



**IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN
DESA MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI
INDEKS DESA MEMBANGUN DI DESA TAPOS 1
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

Disusun Oleh :

SFASE JUSDE JUAN CHRISTIAN RUMSOWEK

192041939

PROGRAM STUDI: ILMU PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar sarjana (S.I.P)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN

ABDI NEGARA

2023

	KOREKSI PENGUJI	NO. Dokumen	:
		Tanggal	: 26 Juni 2023
		Terbit	
		No. Revisi	:1

Nama	: Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek
NPM	: 192041939
Angkatan / Kelas	: XXIX/A2
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul	: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	(SPBE) Dalam Pelayanan Desa Melalui Pengembangan
	Aplikasi Indeks Desa Membangun Di Desa Tapos 1 Kecamatan
	Tenjolaya Kabupaten Bogor Provisnsi Jawa Barat
Sidang Komperensif	: 14 Juni 2023

NO	PEMBIMBING / PENGUJI	SARAN PEMBIMBING / PENGUJI	PARAF
1	Dr. Sumarsono, MDM	a. Kerangka Pemikirah (hal 31) b. Operasional Konsep (hal 31)	
2	Jovan Prima Firmansyah, S.Sos., M.Hum	a. Perbaiki kesalahan penulisan, besar kecil huruf, jarak spasi dan lainnya b. Fokus pada manfaat dari SPBE c. Jelaskan penggunaan SPBE di Tiap-tiap desa/daerah berbeda d. Presentase warga yang dapat mengakses SPBE e. Manfaat bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	 3/7/23
3	Otti Ilham Khair, S.T. S.Sos., M.Si., M.H	a. Perbaiki Daftar Pustaka b. Perbaiki Daftar Lampiran c. Halaman 75 Nilai IDM d. Tingkat Kematangan Desa (IDM) Memenuhi (maju, berkembang, tertinggal)	 3/7-23

Jakarta, 26 Juni 2023

Mengetahui:

(Catur Widiatmoko, SS, M.IP)
 Ketua Program Studi

(Otti Ilham Khair, S.T. S.Sos., M.Si., M.H)
 Pembimbing

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN
DESA MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI
INDEKS DESA MEMBANGUN DI DESA TAPOS 1
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

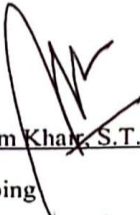
Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek

192041939

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana (S.I.P)
program studi ilmu pemerintahan

Diperiksa dan Disetujui Oleh:


Otti Ilham Khair, S.T. S.Sos., M.Si., M.H.

Pembimbing

Tanggal... 3 Juli 2023


Catur Widiatmoko, S.S., M.I.P.

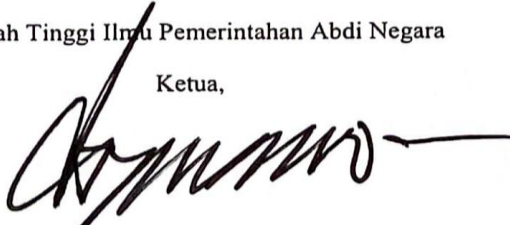
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Tanggal... 3/7/2023

Mengetahui;

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Ketua,


Dr. Sumarsono, MDM.

Tanggal... 4/07/2023

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek

NPM : 192041939

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dibawah ini murni hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi sesuai ketentuan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 3 Juli.....2023

Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek
192041939

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN DESA MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI INDEKS DESA MEMBANGUN DI DESA TAPOS 1 KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:

Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek

NPM: 192041939

Pembimbing

Otti Ilham Khair, S.T. S.Sos., M.Si., M.H.

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kematangan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelayanan dengan menggunakan aplikasi Indeks Desa Membangun pada Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk memahami kemampuan yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian, adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi penelitian, triangulasi metodologi dan triangulasi teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Pelayanan Desa Melalui Pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun. Yang dikatakan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan menunjukkan tingkat kemandirian desa dengan aplikasi IDM dengan melihat dari sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat serta kendala jaringan yang kurang kuat sehingga penginputan data IDM terhambat, aplikasi tersebut masih terkendala saat proses pengiriman data terganggu oleh program itu sendiri, Ini terjadi ketika server, khususnya aplikasi Indeks Pembangunan Desa, tidak hanya 1 desa saja yang menggunakan Aplikasi IDM tetapi seluruh desa yang ada di Indonesia. Desa Tapos I masih diklasifikasi dalam status desa maju dengan skor IDM mencapai 0,7614. Untuk itu pemerintah Desa Tapos I berupaya meningkatkan potensi sumberdaya manusianya serta meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang ketahanan pangan dan perikanan.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEMS IN VILLAGE SERVICES THROUGH THE DEVELOPMENT OF VILLAGE DEVELOPMENT INDEX APPLICATIONS IN TAPOS 1 VILLAGE, TENJOLAYA DISTRICT, BOGOR REGENCY, WEST JAVA PROVINCE

By:

Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek
NPM: 192041939

Mentor:

Otti Ilham Khair, S.T. S.Sos., M.Si., M.H.

This researcher aims to find out how mature the implementation of an electronic-based government system is in service by using the Village Development Index application in Tapos I Village, Tenjolaya District, Bogor Regency, West Java Province. The research method used was qualitative to understand the abilities that were able to be carried out by the research subjects, while the data collection techniques used observation, interviews and documentation studies with a total of 15 informants. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then the data validation techniques used were research triangulation, methodological triangulation and theoretical triangulation.

The results of the study show that the Implementation of an Electronic-Based Government System (SPBE) in Village Services through the Development of the Village Building Index Application. What is said is the Development Village Index (IDM) by showing the level of independence of the village with the IDM application by looking at the human and economic resources of the community as well as network constraints that are not strong so that the input of IDM data is hampered, the application is still constrained when the data transmission process is interrupted by the program itself, this happens when the server, especially the Village Development Index application, not only 1 village uses the IDM application but all villages in Indonesia. Tapos I Village is still classified as a developed village with an IDM score of 0.7614. For this reason, the Tapos I Village government seeks to increase the potential of its human resources and improve the community's economy in the field of food security and fisheries.

Keywords: *Implementation, Electronic-Based Government System, Developing Village Development Index Application.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patutlah dipanjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus Pencipta semesta alam, yang telah memberikan rahmat, berkat, pertolongan serta hidayah kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Pelayanan Desa Melalui Pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM) Di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Adapun skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (S.I.P) di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) dengan segala penuh keterbatasan. Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang di alami dan hadapi namun karena pengetahuan serta hikmat yang diberikan Sang Kuasa kepada Penulis, sehingga mampu menyelesaikan hasil karya penulisan skripsi ini, Dan juga Penulis berterima kasih kepada:

1. Bapk Markus Rumsowek dan Ibu Ferderika Ogaje. orang tua kandung penulis, karena tanpa mereka penulis tidak bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. (*Big love*) untuk Bapa dan Mama)
2. Bapk Dr. Sumarsono, MDM. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

3. Bapak Catur Widiatmoko, S.S., M.I.P. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Otti Ilham Khair, S.T., S.Sos., M.Si., M.H. Dosen Pembimbing Penulis
yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada Penulis,
Selama proses Penulis membuat dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua tenaga kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.
baik Dosen, Karyawan, bagian kepengasuhan dan bagian keamanan
yang telah megajarkan banyak hal kepada Penulis, baik dari segi
akademis dan dari segi moralitas.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat yang teah membantu penulis
dalam pembiyaan semester melalui beasiswa.
7. Pemerintah tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Tenjolaya yang telah
menerima penulis untuk melakukan penelitian di Desa Tapos I
8. Pemarintah Desa Tapos I yang telah menerima dan memberikan pelayanan
terbaik dalam membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir
penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P).
9. Bpk Alexander Inggamer yang telah membantu dalam pengurusan beasiswa
bagi penulis.
10. Ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar Rumsowek/Norewari dan
Keluarga besar Ogaje/Mambrasar yang memberikan Doa dan dukungan
untuk Penulis.

11. Ucapan terima kasih kepada ketiga sahabat saya Viktor Y. Rumander Paul Hendra Saroy dan Zulkifli Patipi yang selalu berbagi pengalaman, suka dan duka yang telah kita Jalani bersama.
12. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mayumi Getzemani Itshua Palili yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Ucapan terima kasih kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) angkatan XXIX yang telah membuat kisah Cerita canda, tawa, suka dan duka yang pernah kita alami semua akan di Kenang dan takan di lupakan.
14. Ucapan terima kasih juga untuk saudara-saudari. kaka-kaka se Papua dan Papua Barat yang berada di asrama Manokwari, asrama Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, asrama Fak-Fak yang merantau menuntut Ilmu demi masa Depan dan selalu bersama dalam kebersamaan.

Jakarta 3 Juli 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek', with a large, stylized flourish at the end.

Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek

NPM: 192041939

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KOREKSI PENGUJI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Dan Subfokus Penelitian.....	6
1.3. Perumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitan.....	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kerangka Teoritis	9
2.1.1 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	9
2.1.2 Teori Pemerintahan	10
2.1.3 Teori Pemerintahan Daerah	11
2.1.4 Pemerintah Desa	14

2.1.5 Pengertian Implementasi	16
2.1.6 Pengertian <i>E-Government</i>	17
2.1.7 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	18
2.1.8 Pelayanan Publik	20
2.1.9 Pengertian Aplikasi	22
2.1.10 Pengertian Indeks Desa Membangun	23
2.2. Hasil Penelitian Yang Relefan.....	29
2.3. Kerangka Pemikiran dan Operasional Konsep.....	30
2.3.1 Kerangka Pemikiran	30
2.3.2 Opreasional Konsep	32
2.4. Hipotesis.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1. Desain Penelitian	33
3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian	34
3.2.1. Lokasi Penelitian	34
3.2.2. Jadwal Penelitian	36
3.3. Latar/Seting Penelitian	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.4.1. Teknik Observasi	39
3.4.2. Teknik Wawancara	39
3.4.3. Teknik Studi Dokumentasi	40
3.5. Teknik Analisis Data	40
3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Gambaran Umum.....	44
4.1.1 Kondisi Geografis.....	45
4.1.2. Kondisi Demografi.....	45
4.1.3. Sarana dan Prasarana Desa Tapos I	47
4.1.4. Pemerintahan Desa Tapos I.....	51
4.1.5. Destinasi Wisata Desa Tapos I.....	53
4.1.6. Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.....	54
4.2. Hasil Penelitian.....	55
4.2.1. Keadaan Indeks Ketahanan Sosial	55
4.2.2. Keadaan Indeks Ketahanan Ekonomi	56
4.2.3. Keadaan Indeks Ketahanan Lingkungan	57
4.3. Pembahasan Temuan Penelitian.....	71
4.3.1 Indeks Ketahanan Sosial.....	75
4.3.2 Indeks Ketahanan Ekonomi.....	76
4.3.3 Indeks Ketahanan Lingkungan.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83
RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Klasifikasi Desa.....	25
Tabel 2.2. Oprasional Konsep	32
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian	36
Tabel 3.2 . Tabel Informan	38
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	46
Tabel 4.2 . Sarana Kesehatan.....	49
Tabel 4.3. Produk UMKM Desa Tapos I.....	54
Tabel 4.4. Keadaan Indeks Ketahanan Sosial.....	55
Tabel 4.5. Keadaan Indeks Ketahanan Ekonomi	56
Tabel 4.6. Keadaan Indeks Ketahanan Lingkungan	57
Tabel 4.7. Data Indeks Desa Membangun Tahun 2021.....	70
Tabel 4.8. Data Indeks Desa Membangun Tahun 2022.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Prosedur Indeks Desa Membangun.....	26
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 3.1 Peta Lokasi	35
Gambar 3.2 Keabsahan Data	43
Gambar 4.1 Grafik Data Tenaga Kerja	46
Gambar 4.2 Grafik Data Pendidikan	48
Gambar 4.3 Struktur Pemerintahan Desa Tapos I	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	83
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	84
Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Wawancara	88
Lampiran 4 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)	104
Lampiran 5 Dokumen Izin Penelitian	118
Lampiran 6 Dokumen Kegiatan Pembimbingan	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era digital yang semakin berkembang secara cepat baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. membantu seluruh warga masyarakat di seluruh belahan dunia dalam mencari informasi yang sedang terjadi atau yang sedang berkembang. Setelah istilah *e-government* muncul di dunia pada tahun 2000.

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, *e-government* menjadi topik hangat. Tujuan banyak negara yang menerapkan *e-government* adalah untuk meningkatkan standar kinerja pemerintah, khususnya dalam jangkauan pelayanan publik sehingga dapat bermanfaat bagi semua warga negara. Negara-negara ini bersaing dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial-politik dan geografis masing-masing. Salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* adalah melalui implementasi *E-Government* yang juga telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dikenal dengan istilah *e-government*. *E-government* terdiri dari dua elemen: penerapan teknologi informasi dan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, Sistem *e-government* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan. Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003, website pemerintah daerah biasanya digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi *e-government*. *E-*

government masih hanya didefinisikan sebagai produksi website, sehingga ketika pertama kali digunakan, sering dianggap dengan membuat website, meskipun sekarang diproduksi dengan berbagai aplikasi.

Salah satu strategi daerah untuk menciptakan pelayanan daerah dan menampilkan potensi daerah adalah *website e-government*. Oleh karena itu, proses pengembangan situs web perlu diatur dan mengikuti langkah-langkah yang tepat di setiap tahap. Salah satu cara pemerintah Indonesia mendukung keterbukaan dalam pemerintahan, khususnya di tingkat daerah, adalah melalui penerapan *e-government*. Masyarakat akan dapat memantau semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan konsep keterbukaan atau transparansi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Istilah *e-government* yang baru dikenal dan masuk, ke indonesia setelah mulai munculnya penggunaan internet yang yang digunakan pemerintah dan mulai dimanfaatkan untuk mendukung *good government* dan mempercepat proses demokrasi. *e-government* mulai digunakan pemerintah sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika.

Adapun dasar-dasar hukum dalam *e-goverment*

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi: setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan,

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan seluruh jenis saluran yang ada.

2. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan *E-government*.

E-government didasari oleh kebutuhan masyarakat yang menginginkan Pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

3. Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik. pasal 1 menyatakan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: menyatakan bahwa salah satu tujuan dari regulasi desa adalah meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan teknologi dan informasi yang sejalan dengan tujuan pemerintah pusat.

Dalam rangka menjalankan Undang-undang serta Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Desa Tapos 1 akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta pelayanan publik yang berkualitas dan andal melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengikuti Undang-Undang dan Peraturan Presiden (SPBE). SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan

pemerintahan yang diamanatkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan SPBE adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan SPBE yang meliputi 3 (tiga) bidang yaitu tata kelola, pengelolaan, dan pelayanan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintahan Negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, semenjak lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, Desa semakin berkembang dan maju bahkan sudah menjadi prioritas negara ini, dalam hal ini pemerintah berusaha membangun pelayanan mulai dari desa. *e-government* merupakan pendekatan pemerintah melalui teknologi elektronik.

Sejalan dengan itu, penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan semakin menguat, hingga ke tingkat pemerintahan desa. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan pembangunan kepada masyarakat, tuntutan ini harus diatur dengan kesiapan pemerintah desa melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas. Sehingga *e-government* dapat berjalan dengan baik.

Oleh karenanya pasal 82-86 UU Desa mengisyaratkan agar pemerintah desa memiliki sistem informasi desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa.

Dengan hadirnya *e-government* ini maka dibentuklah aplikasi yang dibuat oleh kementrian desa dalam membantu pelayanan di desa dengan menggunakan aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM), indeks desa membangun ini dibentuk dari 3 komponen yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan ekologi. IDM mengkategorikan masyarakat sebagai salah satu

dari lima (5) status: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, atau Desa Mandiri. Penggolongan menjadi 5 (lima) status desa juga dimaksudkan untuk mempertajam penetapan status pembangunan desa sekaligus merekomendasikan langkah-langkah pemerintah yang tepat.

Penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (*baseline*) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektivitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa Dengan nilai rata rata indeks desa membangun di tertapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : 0,4907
2. Desa Tertinggal : > 0,497 s.d < 0,5989
3. Desa Berkembang : >0,5989 s.d < 0,7072
4. Desa Maju : >0,7072 s.d < 0,8155
5. Desa Mandiri : >0,8155

Dengan melihat dari perkembangan yang sering terjadi di desa, kebanyakan dari desa belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi *e-government* ini, salah satunya Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat. Pemerintah Desa Tapos 1 kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam mengembangkan potensi sumberdaya dalam indeks desa membangun masih belum berpotensi untuk menjadikan status desa sebagai desa mandiri, untuk itu dengan hadirnya aplikasi website yang dibuat pemerintah oleh Kementerian Desa diharapkan desa dapat membangun kesejahteraan rakyatnya.

1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1.2.1. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas, fokus penelitian ini lebih ditekankan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan desa dengan menggunakan aplikasi IDM dalam membangun desa di Desa Tapos 1

1.2.2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yaitu:

1. Penggunaan aplikasi Indeks Desa Membanun Desa tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan desa menjadi desa mandiri
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya mengembangkan desa dengan menggunakan situs website idm.kemendesa.go.id

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada pun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kematangan implementasi SPBE pada Pemerintah Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana upaya pemerintah Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam mengembangkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan desa dengan status desa mandiri dengan menggunakan aplikasi idm.kemendesa.go.id?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengembangkan desa dengan menggunakan website idm.kemendesa.go.id?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kematangan implementasi SPBE di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam mengembangkan sumber daya yang dibutuhkan dalam mewujudkan desa dengan status desa mandiri dengan menggunakan aplikasi idm.kemendesa.go.id

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam sistem kerja aplikasi situs web IDM pada desa tapos 1 kecamatan tenjolaya kabupaten bogor

1.5. Kegunaan penelitian

1.5.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sistem pemerintahan desa dalam mengembangkan teori-teori tentang pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan dengan menggunakan aplikasi Indeks Desa Membangun.

1.5.2 Secara praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat melalui pengetahuan tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di desa.
2. Bagi akademisi manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan agar lebih memperdalam tentang perkembangan teknologi berbasis elektronik yang digunakan pemerintah dalam pelayanan desa sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah. Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyeluruh atau perkataan yang menyuruh dengan, ada yang diperintah dan ada yang perintah. Badan yang melakukan kekuasaan memerintah atau kekuasaan memerintah suatu daerah, atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu negara.

Jika dilihat dalam arti sempitnya, pemerintah adalah badan atau lembaga eksekutif dalam negara misalnya presiden, gubernur, bupati dan walikota. Sedangkan dalam arti luasnya yang disebut pemerintah adalah semua aparatur negara baik itu eksekutif, legislatif (parlemen) atau yudikatif (lembaga hukum).

Secara umum, pengertian pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai

tujuan negara. Dalam arti luas pemerintahan dapat dikatakan suatu kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara

2.1.2. Teori Pemerintahan

Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja, Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Menurut Ermaya Suradinata (2002:14-15), bahwa pemerintahan adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pandangan tentang pemerintahan tersebut luas, karena semua aktifitas kegiatan negara diselenggarakan dalam rangka memberikan kesejahteraan dan rasa aman pada masyarakat. Proses tersebut melibatkan militer, kepolisian, fungsi legislatif, keuangan dan penegak hukum yang berkeadilan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan bagi kepentingan bangsa.

Menurut Soemandar (dalam Syafiie 2011:8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan,

pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

2.1.3. Teori Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan merupakan salah satu bentuk negara yang berdasarkan kesepakatan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, sampai kapanpun undang-Undang ini tidak akan diubah. Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan pemerintahan daerah atas dasar gagasan otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat menjangkau daerah-daerah yang paling jauh dari pusat pemerintahan. Pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap daerah otonom yang menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tersebut sejatinya merupakan amanah pengaturan Pemerintahan Daerah dalam konstitusi, yakni Pasal 18 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang keuangan, pelayanan umum, pengusahaan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dikendalikan dan dilaksanakan secara adil dan merata berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam kedua pasal ini, sebagaimana diatur dalam undang-undang organik, mempunyai implikasi “lanjutan” dalam penerapannya, yaitu adanya hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom, delegasi atau delegasi berbagai urusan dari pusat ke daerah hingga kemerdekaan, yang coba dibangun di daerah-daerah otonom. Penyerahan atau pelimpahan urusan dari pusat ke daerah juga diakui sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah. masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi. dari orang-orang. Baik pengalihan maupun pelimpahan urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Otonom harus ditanggapi dengan serius.

Mengingat negara kita berkomitmen untuk mempertahankan bentuk kesatuannya, maka konsep yang harus dibangun dalam hal hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus diatur sedemikian rupa agar tidak membahayakan bentuk kesatuan.

2.1.4. Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diperkenankan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa didirikan atas asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dijunjung tinggi dalam struktur pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Saniyanti Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Menurut Bintarto (1983:11-12) memberi batasan pengertian desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Dalam arti umum desa merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota.

Selain para ahli, desa memiliki pengertian dan definisi dari sudut pandang pemerintah, seperti yang didefinisikan oleh lembaga pemerintah dan undang-undang. Berikut adalah pengertian desa menurut definisi undang-undang;

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok di Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kemampuan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berkedudukan di wilayah Kabupaten.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah geografis, kesanggupan untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan: prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak ulayat yang diakui dan diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 1-3 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.1.5. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata kerja bahasa Inggris *to implement* yang artinya melaksanakan. Penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang mempunyai pengaruh atau pengaruh terhadap sesuatu disebut sebagai pelaksanaan. Sesuatu yang dilakukan untuk mempunyai pengaruh atau akibat dalam kehidupan bernegara dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Implementasi ini merupakan suatu aplikasi atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana yang telah disusun atau dihasilkan secara cermat

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada didalam *Organizing-Leading-Controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan,

melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian

2.1.6. Pengertian *E-Government*

E-Government adalah penggunaan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. *e-government* merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. *E-Government* biasa dikenal *e-gov*, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. *e-government* adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

Menurut Depkominfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan *e-government* adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id)..

Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *e-government* adalah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

2.1.7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE menciptakan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang berupa kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pelaporan berbasis elektronik.

Penggunaan SPBE Pada tingkat daerah juga berbeda-beda karena sistem pemerintahan berbasis elektronik di gunakan sebagai pemanfaatan teknologi

pelayanan. Untuk pemanfaatannya sendiri bisa di kembangkan tiap-tiap daerah dengan platform yang berbeda namun harus dengan ketentuan regulasi Perpres No 95 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Presiden ini pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Diterbitkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Regulasi yang mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola dan pengelolaan sistem secara nasional, dengan tujuan meningkatkan integrasi dan efisiensi sistem pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna SPBE dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

SPBE dilaksanakan dengan beberapa prinsip utama, antara lain:

1. Prinsip efektivitas, yang merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Prinsip keterpaduan, yang merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

3. Prinsip kesinambungan, yang merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Prinsip efisiensi, yang merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Prinsip akuntabilitas, yang merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Prinsip interoperabilitas, yang merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
7. Prinsip keamanan, yang merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

2.1.8. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah Segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya memenuhi tuntutan penerima pelayanan dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan dianggap sebagai pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi dan efektifitas yang akan mendukung tercapainya efisiensi biaya, yang berarti apabila pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit.

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat harus akuntabel dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka

peningkatan pelayanan publik. Pada hakikatnya, setiap masalah harus memiliki landasan teori pendukung atau penghubung agar dapat dikuatkan. Oleh karena itu, penulis akan memberikan berbagai teori untuk membantu dalam proses pemecahan masalah penelitian yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Di Indonesia, kata *public service* sering dikaitkan dengan *public service* sebagai terjemahan dari *public service*. Di Indonesia, konsep pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan perizinan sering digunakan secara bergantian atau sinonim.

Menurut Moenir (2015: 27) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat.

Menurut Mahmudi (2007: 128) Mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik menurut (sinambela 2014: 5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah tindakan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan

penduduk atas produk, jasa, dan pelayanan administrasi. Pengertian pelayanan perizinan disebut sebagai publik.

Sedangkan dalam Peraturan pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik.

2.1.9. Pengertian Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata *Appllication* yang menurut kamus Komputer Eksekutif (1993:9), *Appllication* adalah masalah yang memakai teknik pemrosesan data aplikasi biasanya mengacu pada komputasi yang diinginkan, atau pemrosesan data.

Pengertian aplikasi menurut Yan Tirtobisono (1999:21) adalah istilah yang digunakan untuk pengguna komputer bagi pemecahan masalah. Biasanya istilah aplikasi dipasangkan atau digabungkan dengan suatu perangkat lunak misalnya Microsoft Visual Basic 6.0, akan dapat memberikan makna atau arti baru yaitu suatu program yang ditulis atau dibuat untuk menangani masalah tertentu.

Aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain

1. Perangkat lunak perusahaan (*enterprise*)

2. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan
3. Perangkat lunak informasi kerja
4. Perangkat lunak media dan hiburan
5. Perangkat lunak pendidikan
6. Perangkat lunak pengembangan media
7. Perangkat lunak rekayasa produk

2.1.10 Pengertian Indeks Desa Membangun

Indeks digambarkan sebagai angka yang akan digunakan untuk menunjukkan tingkat harga, volume perdagangan, dan sebagainya selama periode waktu tertentu terkait dengan nilai yang dinyatakan dengan angka 100 untuk periode dasar tertentu.

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satunya mengatur tentang pendataan Desa, maka diperlukan pemutakhiran data IDM tahun 2022.

Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan

jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa

serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

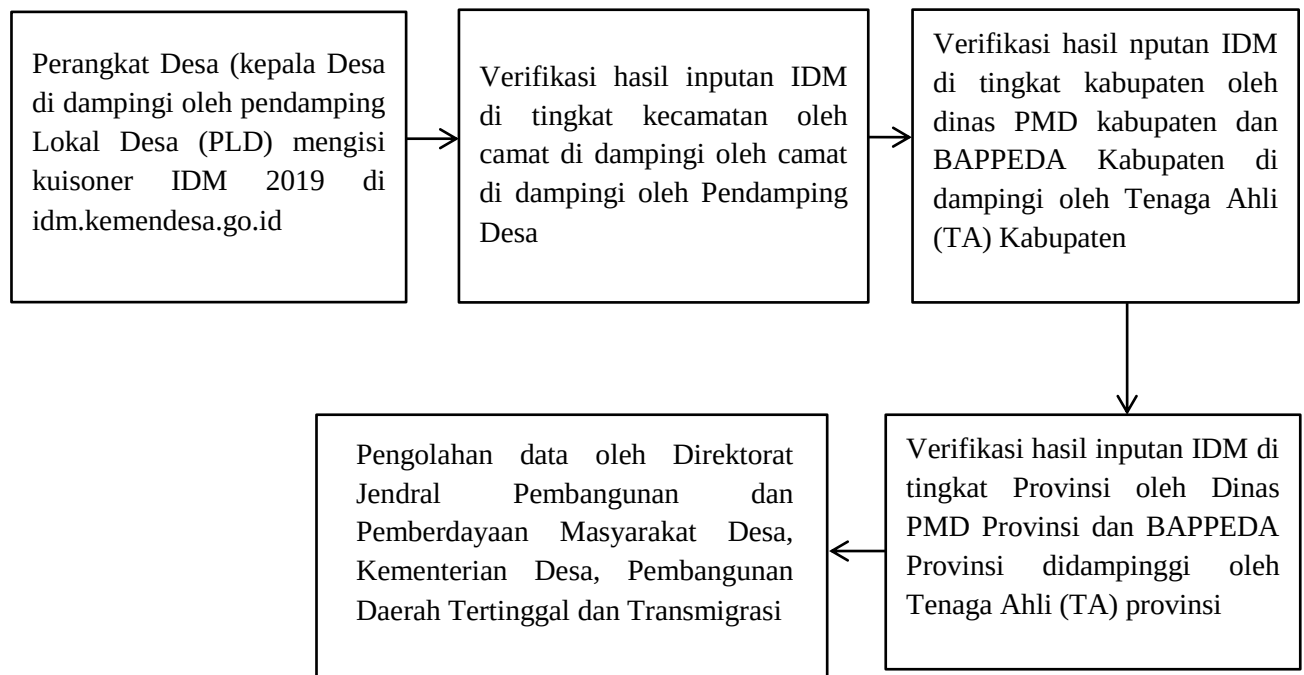
Tabel 2.1 Data Klasifikasi Desa

Klasifikasi Desa	Data per Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Mandiri	840 Desa	1.741 Desa	3.278 Desa	6.239 Desa
Maju	8647 Desa	11.899 Desa	15.324 Desa	20.248 Desa
Berkembang	38.185 Desa	39.866 Desa	38.086 Desa	33.892 Desa
Tertinggal	17.626 Desa	13.961 Desa	12.177 Desa	9.234 Desa
Sangat Tertinggal	3.536 Desa	2.466 Desa	4.985 Desa	4.438 Desa

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id/>

Prosedur Indeks Desa Membangun

Dalam tahapan pengimputan data yang di input Desa bersama pendamping lokal desa memiliki tahapan tahapan yang harus dilewati dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Alur Prosedur Indeks Desa Membangun

Sumber : website <https://idm.kemendesa.go.id/>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Pasal 1, yang dimaksud
dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
8. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
9. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas

menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
14. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
16. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.
17. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian pernah dilaksanakan terkait implementasi *E-government* dalam penyelenggaraan pelayanan desa dengan studi kasus perkembangan aplikasi Indeks Desa Membangun di antaranya:

1. Wildan Zainul Faki (Skripsi tahun 2019) dengan judul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Eviana Septiana Rachman, Beni Noviyanto dikutip dari Jurnal Tam 2017, dengan judul Pemanfaatan *E-Government* Pada Desa Wonokarto Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Informasi Potensi Desa. dari hasil analisa peneliti menjelaskan bahwa pemanfaatan *E-government* di pemerintahan Desa Wonokarto merupakan elektronik berbasis web yang bertujuan untuk: meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pengembangan *e-government* merupakan salah satu upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien
3. Ach muhyiddin¹, Irwan Darmawan² (Jurnal Insand Comtech 2021) Dengan Judul Sistem Informasi IDM (Indeks Desa Membangun) Berbasis Web Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep.

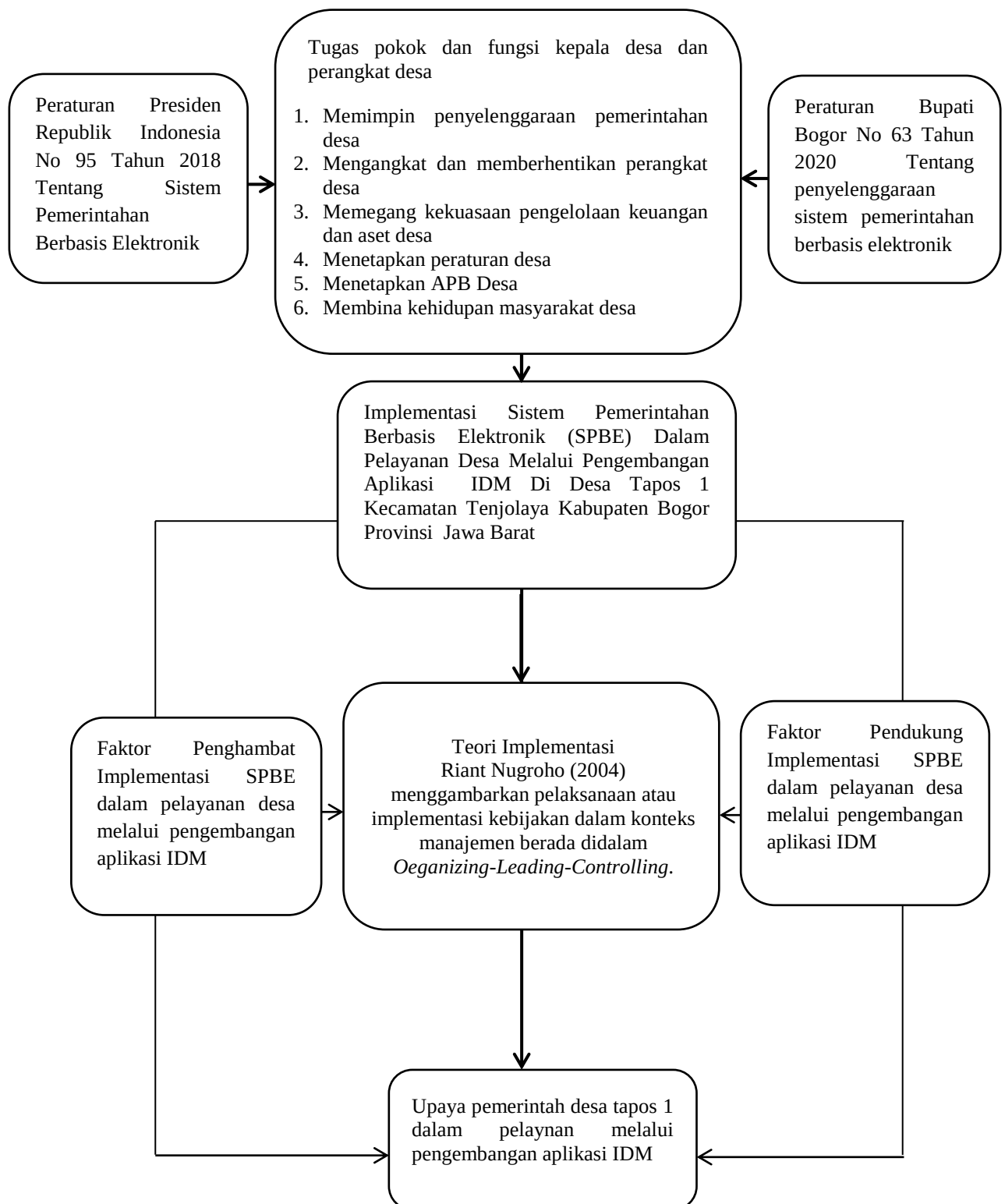
Dengan sistem informasi IDM ini sangat membantu dan mempermudah karyawan di dinas yang terkait misalnya contoh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ke dua peneliti tersebut adalah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini kita melihat bahwa untuk merancang aplikasi IDM diperlukan tahap dalam proses pembuatanya yaitu dengan Pengumpulan Data, Analisis Sistem, Kebutuhan Sistem, Perancangan Sistem, dan Pembuatan sistem. Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dengan aplikasi IDM ini bisa membantu karyawan dalam melakukan tugas dan pelayanan bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2.3. Kerangka Pemikiran dan Operasional Konsep

2.3.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis dan kajian empiris yang telah dikaji dari sub bab sebelumnya maka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Pelayanan Desa Melalui Pengembangan Aplikasi IDM diharapkan bisa mendorong potensi yang dimiliki desa agar bisa mewujudkan desa sebagai desa mandiri pada desa tapos 1 kecamatan tenjolaya, dimana implementasi ini diukur dengan menggunakan teori Implementasi model menurut Riant Nugroho (2004:163) dimana dijelaskan secara rinci kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui: (a) implementasi strategi (b) pengorganisasian (c) pergerakan dan kepemimpinan

Berdasarkan hasil hasil kajian teori yang dijelaskan, maka dirumuskan suatu alur penelitian melalui kerangka pemikiran yang di rumuskan peneliti secara keseluruhan.



Gambar 2.2. Kerangka pemikiran

2.3.2. Operasional Konsep

Tabel 2.2. Oprasional Konsep

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Pelayanan Desa Melalui Pengembangan Aplikasi IDM Di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Teori Implementasi Riant Nugroho (2004:163)	Implementasi strategi	➤ Perencanaan ➤ Struktur Organisasi ➤ Sumberdaya manusia
	Pengorganisasian	➤ Menetapkan tujuan ➤ Menetapkan tugas tugas pokok anggota organisasi ➤ Melakukan tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci ➤ Mengalokasikan sumberdaya yang tersedia.
	Pengerakan dan kepemimpinan	➤ Membuat keputusan dan mencari solusi dalam permasalahan ➤ Menjadi inspirasi ➤ Tumbuhkan motivasi ➤ Komunikasi yang baik.
	pengendalian	➤ Penetapan standard dan metode penilaian kinerja ➤ Penilaian kinerja sesuai standar ➤ Pengambilan tindakan koreksi.

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan hal-hal di atas yang telah di uraikan hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Dengan penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintah Desa Tapos 1 sehingga bisa mencapai efisiensi, dan integritas.
2. Upaya pemerintah desa adalah mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di desa
3. Faktor penghambat yang biasanya terjadi dalam aplikasi website IDM adalah keterlambatan dalam mengirim data-data yang dibutuhkan sehingga membuat klasifikasi desa kedalam aplikasi menjadi terhambat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian, pendekatan yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, serta data yang dikumpulkan peneliti berupa data data kualitatif, karena maksud dan tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan menguraikan dan menggambarkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggara Pelayanan Desa dengan mengambil studi kasus Perkembangan Aplikasi Indeks Desa Mambangun Pada Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pemilihan metode deskriptif ini dilakukan karena menurut peneliti metode ini tetap dengan judul yang peneliti ajukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mayer dan Greenwood (dalam Silalahi, 2010) membedakan dua jenis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Seperti penjelasannya sebagai berikut: Deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi.

Menurut Nana Syaodih (2007:52) mengemukakan bahwa : “rancangan penelitian (*research design*) menggambarkan prosedur atau langkah-langkah

yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi dengan data apa yang dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data dihimpun serta tersebut diolah

3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan berada di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Peneliti mengambil lokasi ini karena tetap dijadikan untuk penelitian. Lokasi penelitian ini berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti ambil yaitu “implemntasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik dalam pelayanan desa melalui pengembangan aplikasi indeks desa membangun pada desa tapos 1 kecamatan tenjolaya kabupaten bogor provinsi jawa barat)” karena di Desa ini peneliti melihat bahwa pengembangan Indeks Desa Membangun masih perlu meningkatkan sumber daya dalam mewujudkan desa kedalam klasifikasi desa sebagai desa mandiri.



Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian

Sumber: <https://www.google.co.id/intl/id/earth/>

3.3. Latar atau Setting Penelitian

Setting penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif dan ditentukan ketika fokus penelitian ditetapkan. Setting dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penyelidikan.

Fakta-fakta yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan meliputi peristiwa, peristiwa, bukti, perkataan, tindakan, dan perilaku pemerintah desa dalam mengembangkan potensi sumber dayanya untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam indeks desa membangun. Dan informasi dikumpulkan melalui prosedur wawancara, pengalaman mendalam, dan pemeriksaan langsung terhadap proses kinerja. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai lapisan masyarakat serta berbagai lapisan fenomena yang dianalisis, sehingga informasi tersebut pada akhirnya terpetik dan akurat dalam menyampaikan informasi yang disampaikan dengan tepat. sesuai dengan standar informasi yang sangat baik, antara lain penyampaian fakta, kejujuran, berbicara dengan baik dan mampu berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab, dan memahami tujuan belajar, menguasai informasi serta berbagi pengetahuan dan menjunjung tinggi sikap saling percaya.

Informan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah oleh peneliti maka dibutuhkan informasi yang sesuai dengan data peneliti, informan yang dibutuhkan terdiri atas:

Tabel 3.2. Daftar Informan

No	Nama	Jumlah Orang
1.	Kepala Camat	1
2.	Pendamping Lokal Desa	1
3.	Kapala Desa	1
4.	Sekretaris Desa	1
5.	Kepala Seksi Pelayanan Desa	1
6.	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	1
7.	Kepala Urusan TU dan Umum	1
8.	Kepala Urusan Keuangan	1
9.	Ketua Rw 06	1
10.	Masyarakat	6
Jumlah Informan		15 Orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah strategi yang digunakan untuk mencapai suatu pilihan dan kesimpulan bagi individu yang diamati melalui serangkaian kegiatan. Karena apa yang dinyatakan terkadang tidak sering sama dengan apa yang dilakukan, observasi merupakan teknik yang berguna untuk belajar tentang suatu objek yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelayanan di desa dengan menggunakan aplikasi Indeks Desa Membangun melalui situs website idm.kemendesa.go.id di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

3.4.2. Teknik Wawancara

Pendekatan wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi dalam bentuk pernyataan lisan mengenai suatu barang atau peristiwa masa lalu, sekarang, atau yang akan datang.

Menurut Sugiyono (2018:467) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana wawancara semi terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.

3.4.3. Teknik Studi Dokumentasi

Penelitian dokumentasi adalah salah satu pendekatan pengumpulan data kualitatif tentang suatu subjek dengan melihat dan mengevaluasi dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain mengenai subjek tersebut.

Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan, mengkategorikan, dan mencari pola atau tema untuk memahami maknanya. Organisasi data memerlukan pengkategorian informasi ke dalam pola, topik, atau kategori. Akan terjadi kekacauan jika data tidak dikategorikan atau diklasifikasikan.

Menurut Miles dan Huberman, (1992:16) analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.
2. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.
3. Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data ini bukan hanya digunakan untuk menunjang apa yang telah ditunjukkan di dalam konsep penelitian kualitatif, validitas diatasi melalui penerapan prinsip-prinsip triangulasi data. Teknik triangulasi data dapat disebut juga triangulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam pengumpulan data, peneliti juga berusaha menggunakan

berbagai sumber yang ada. Teknik model triangulasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Triangulasi Penelitian

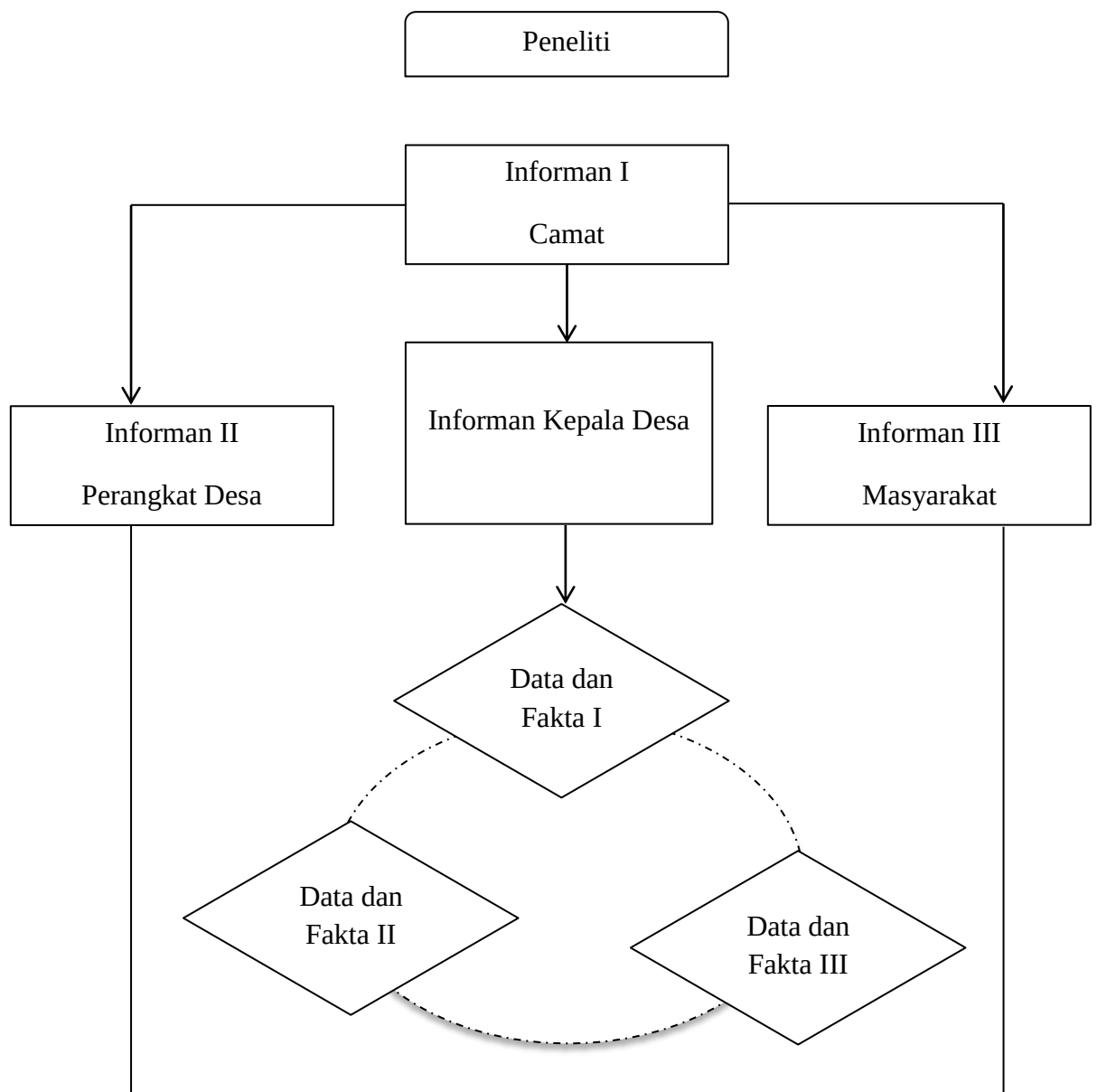
(Sutopo, 2006:3) Triangulasi penelitian adalah hasil penelitian baik yang berupa data maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya dapat diuji peneliti lain. Triangulasi peneliti dapat dilakukan dengan penyelenggaraan diskusi atau melibatkan beberapa penulis yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi.

2. Triangulasi Metodologi

(Patto dalam Sutopo 2006:93). Teknik triangulasi metode digunakan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda.

3. Triangulasi Teoritis

(Patto dalam Sutopo 2006:98). Triangulasi jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, dalam melakukan jenis triangulasi ini, peneliti harus memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.



Gambar 3.2. Keabsahan Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Nama Desa Tapos diambil dari nama sebuah pohon langka yang berada di desa ini yaitu Pohon Tapos, menurut cerita orang tua dulu turun temurun konon katanya pada zaman penjajahan Belanda ataupun Jepang Desa Tapos tidak pernah disinggahi oleh para penjajah bahkan konon katanya, tembakan meriam yang diarahkan kepada para pejuang yang berada di wilayah Tapos tidak pernah jatuh melewati desa Tapos berkat Do'a dari salah satu tokoh pejuang yang mempunyai kesaktian yang dapat mencegah mara bahaya dan ancaman keselamatan bagi warga desa Tapos yaitu dikenal dengan nama H. Mama Marga.

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1988 Desa Tapos terbagi menjadi dua yaitu Desa Tapos I dan Desa Tapos II kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa Tapos I yang pertama, adapun kantor Desa Tapos I sebelum pemekaran terletak di Desa Tapos II. Pada tanggal 13 September 1991 Desa Tapos I terbentuk dan memiliki Kantor Desa yang resmikan oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Bogor EDDIE YOSO MARTADIPURA yang menandatangani Prasasti setelah selesainya Kantor Desa Tapos I.

4.1.1. Kondisi Geografis

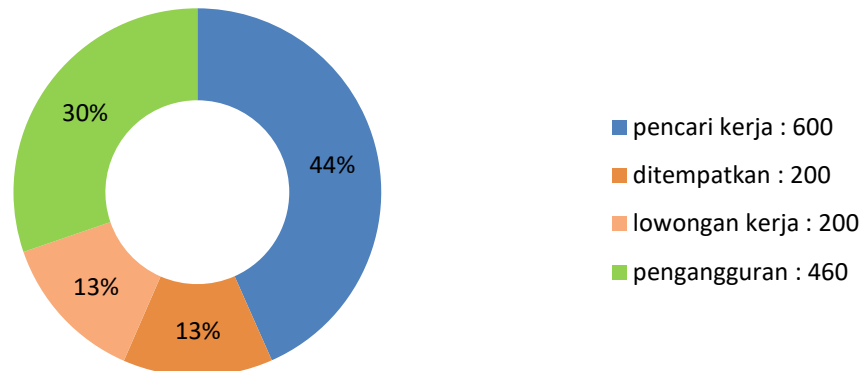
Desa Tapos I berada di ketinggian 700 M Dpl dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata 28 C – 32 C, dengan luas wilayah 481.719 Hektar Secara Tomografi Desa Tapos I keberadaanya sangat bervariasi yaitu berupa dataran tinggi/berbukit/bergunung-gunung di sebelah selatan dan barat sedangkan dataran rendah di sebelah timur dan utara dengan kemiringan 20 dengan curah hujan rata – rata 456 mm per tahun. secara geografis berbatasan dengan

- **Sebelah utara** ≠ Desa Tapos II
- **Sebelah selatan** ≠ Peru Tani
- **Sebelah timur** ≠ Desa Gunung Malang
- **Sebelah barat** ≠ Desa Gunung Bundar

4.1.2. Kondisi Demografi

Demografi desa tapos I meliputi distribusi penduduk, serta jumlah penduduk berubah setiap tahun akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta lanjut usia. Desa tapos I memiliki jumlah penduduk Mulai tahun 2022 memiliki jumlah Total 9168 jiwa, dengan total penduduk laki-laki 4738 dan perempuan 4430 jiwa yang tersebar di 2 Dusun, terhitung jumlah penduduk yang datang 103 dan penduduk yang pergi 120. Berdasarkan data jumlah penduduk sesuai pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Data Tenaga Kerja



Gambar 4.1 Grafik Data Tenaga kerja
sumber : Profil Desa Tapos

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Petani	Petani_Lk	2544
		Petani_Pr	8
2.	Nelayan	Nelayan__Lk	0
		Nelayan_	0
3.	Buruh Tani/Buruh nelayan	Buruh Tani_Lk	1386
		Buruh Tani_Pr	189
4.	Buruh Pabrik	Buruh Pabrik_Lk	810
		Buruh Pabrik_Pr	59
5.	PNS	PNS_Lk	35
		PNS_Pr	20
6.	Pegawai Swasta	Swasta_Lk	142
		Swasta_Pr	55
7.	Wiraswasta/ Pedagang	Wiraswasta_Lk	530
		Wiraswasta_Pr	57
8.	TNI	TNI_Lk	2
		TNI_Pr	0
9.	Polri	Polri_Lk	1
		Polri_Pr	1
10.	Dokter (swasta/honorar)	Dokter_Lk	0
		Dokter_Pr	0
11.	Bidan (swasta/honorar)	Bidan	2
12.	Perawat (swasta/honorar)	Perawat_Lk	2
		Perawat_Pr	5

Sumber : Kantor Desa Tapos I

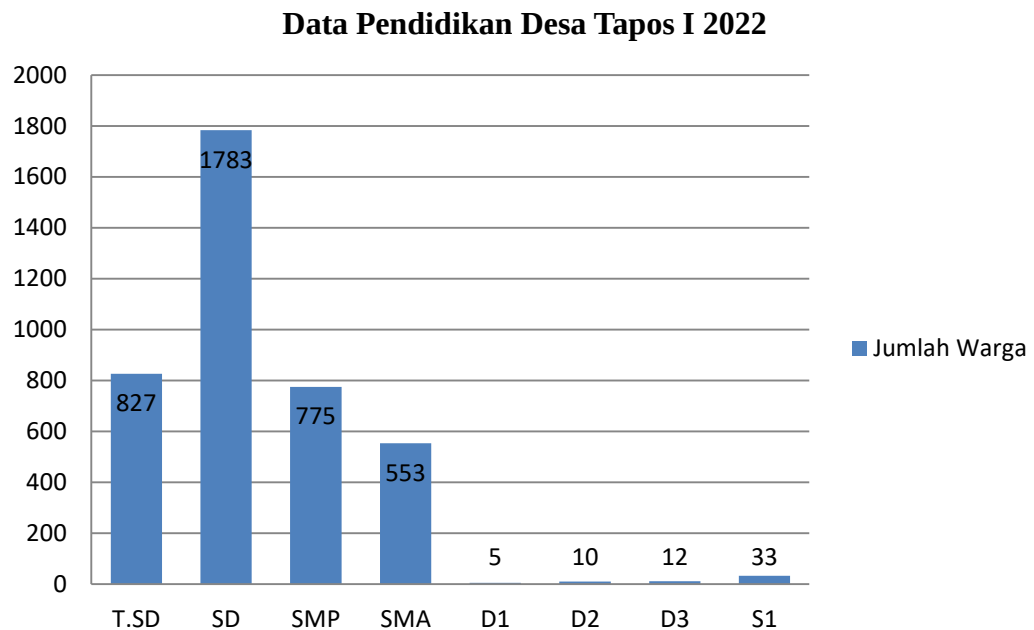
4.1.3. Sarana dan Prasarana Desa Tapos I

Sarana dan prasarana yang lainya yang terdapat pada desa tapos I yaitu:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Sosial budaya
- Informasi dan Komunikasi
- Akses Air Bersih

a. Sarana dan prasarana pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan adalah pelayanan dasar, urusan wajib setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak oleh karena itu, pemerintah desa tapos I dan pemerintah kota bogor saat ini menjadi misi kota bogor yaitu mewujudkan kota yang cerdas, untuk mewujudkan itu maka tiap-tiap pemerintah di tingkat kecamatan sampai ke tingkat pemerintahan desa khususnya desa tapos I dalam perencanaan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sarana dan prasarana pendidikan desa tapos I memiliki jumlah gedung sekolah, 1 unit TK, 4 unit SD, 1 unit SMP dan 2 unit SMU/MA/SMK. serta tingkat pendidikan masyarakat yang dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.2. Grafik Data Pendidikan
Sumber : Profil Desa Tapos

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi . tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan . fasilitas pelayanan kesehatan adalah salah satu alat atau tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat. Data tenaga kesehatan Desa Tapos I sebagai berikut:

Tabel 4.2 :Sarana Kesehatan

No	Puskesmas	Posyandu	Bidan	Perawat
1	1	7	2	7

Sumber: Kantor Desa Tapos I

c. Sosial Budaya

Organisasi sosial budaya yang terdapat pada Desa Tapos 1 di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dengan persentase penduduk yang cukup banyak sudah sangat baik jika dilihat dari organisasi sosialnya. Karena pemerintah desa tapos I sudah berupaya dalam mewadahi masyarakat ke dalam organisasi-organisasi sosial dan juga terdapat kebiasaan gotong royong warga desa adapun organisasi sosial yaitu: Karang Taruna, PKK, Kelompok/organisasi Pengrajin,Kelompok/Organisasi Tani.

Budaya yang ada pada masyarakat Desa tapos I lebih cenderung menggunakan bahasa sunda sehari-hari , tidak identik dengan bahasa sunda Jawa Barat. Dan banyak juga masyarakat desa setempat yang mencari pekerjaan di jakarta. Selain itu bahasa juga dipengaruhi oleh akulturasi pada wilayah tersebut.

Sarana dan prasarana keagamaan untuk melakukan kegiatan keagamaan di desa tapos I sudah sangat ditunjang dengan tersedianya tempat-tempat beribadah, dengan rata-rata penduduk dengan mayoritas beragama muslim dengan sarana tempat ibadah seperti masjid berjumlah 7 masjid yang berada pada desa tapos I.

d. Informasi dan Komunikasi

Pentingnya informasi dan komunikasi saat ini sudah semakin memudahkan warga masyarakat desa tentunya di era digitalisasi ini banyak masyarakat lebih mudah mengetahui informasi melalui media elektronik juga komunikasi yang semakin pesat perkembangannya dengan menggunakan handphone android. Sarana pendukung dalam informasi dan telekomunikasi pada desa tapos I yaitu tersedianya jaringan internet dan jaringan telepon seluler.

e. Akses Air Bersih

Air merupakan sumber kebutuhan utama dalam tubuh setiap manusia maka dari itu air merupakan sumber yang paling penting baik digunakan untuk minum juga dipakai untuk mandi juga mencuci dan lain-lain oleh karena itu desa tapos I memiliki akses air bersih dan air minum yang bersumber dari mata air gunung salak, air minum warga di desa bersumber dari ledeng tanpa meteran, air untuk mandi/cuci warga di desa bersumber dari air ledeng tanpa meteran dan juga bersumber dari sungai/kali.

4.1.4. Pemerintahan Desa Tapos I

Desa Tapos I termasuk dalam administrasi Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Struktur Organisasi Desa Tapos I Terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pelaksanaan Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan dengan visi dan misi:

Visi

“Mewujudkan Desa TAPOS I yang Maju, Mandiri dan Terdepan”

Misi

1. Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dan Agamis, Tertunjang Oleh tersedianya sarana Peribadatan dan Sumberdaya manusia yang kompeten.
2. Membangun Pola hidup sehat melalui pemberdayaan kader kesehatan dan optimalisasi kelembagaan yang ada.
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif dan Responsif.

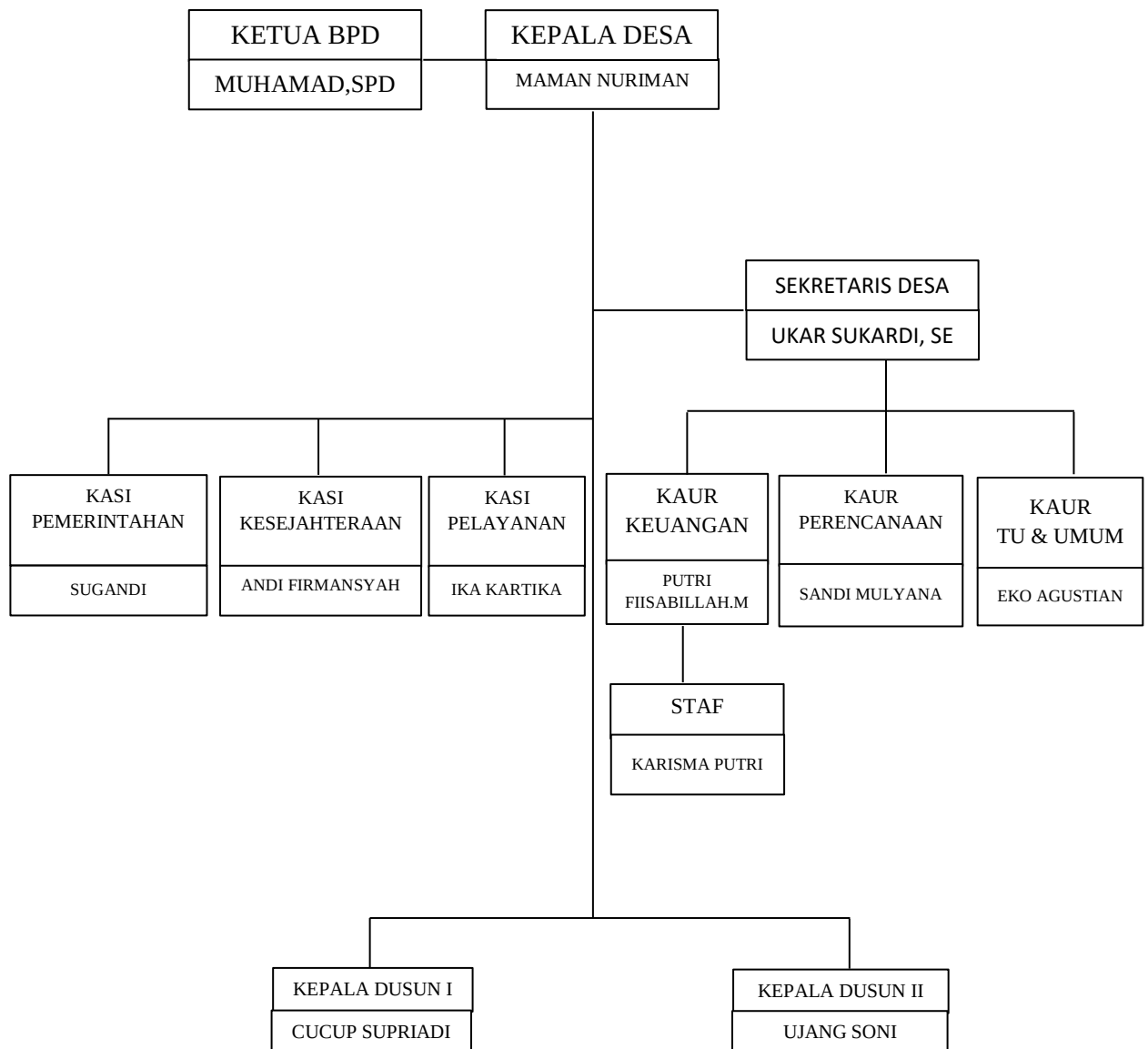
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa dalam pasal tiga yang berbunyi:

Perangkat desa terdiri atas

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis

Susunan struktur organisasi Desa Tapos 1 dan tata kerja pemerintahan desa tapos 1 dapat dilihat dalam struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
DESA TAPOS I KECAMATAN TENJOLAYA
KABUPATEN BOGOR



Gambar 4.3. : Struktur Pemerintahan Desa Tapos I
Sumber Data : Desa Tapos I

4.1.5. Destinasi Wisata Desa Tapos I

a. Curug Muara

Curug Muara berada di bawah kaki Gunung Salak yang lokasinya memiliki air terjun serta sungai untuk arung jeram. Aliran air yang ada sangat menyegarkan, jernih, dan bebas bau kaporit sehingga selain memanjakan mata juga menyegarkan kondisi tubuh.

b. Curug Ciputri

adalah destinasi wisata alam yang berlokasi di kaki Gunung Salak, serta suguhan utama dari lokasi wisata tersebut adalah pesona air terjun dan kenikmatan saat melakukan camping.

c. Situs Purbakala Arca Domas

Situs Purbakala Arca Domas sendiri adalah sebuah situs ini merupakan salah satu destinasi wisata yang menawarkan nilai sejarah dari peninggalan purbakala Situs ini berada di Desa Tapos 1, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor,

d. Curug Cipeuteuy

Curug Cipeuteuy sendiri terletak di kaki Gunung Salak, atau tepatnya di Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Curug Cipeuteuy memiliki daya tariknya sendiri. Di sini, kamu tak hanya disuguhi pemandangan air terjun, namun juga hutan pinus yang cukup luas.

4.1.6. Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Produk UMKM desa tapos 1 menyediakan perlengkapan kerajinan bambu, hijab, mainan anak-anak.

Tabel 4.3 : Produk UMKM Desa Tapos 1

No	Nama Produk	Keterangan	Harga pasaran
1.	Sapu Lidi	Sapu lidi dari batang daun sawit dengan gagang dari bambu yang kemudian diikat dengan kain. Kokoh dan tidak	Rp12.000
2.	Topi Petani (Caping)	Topi petani atau caping dari kerajinan anyaman bambu dengan ukuran luar 40 cm dan diameter kepala 25 cm. Co	Rp22.000
3.	Rantang Bambu	Rantang bambu hasil anyaman lokal UMKM Desa Tapos 1	Rp40.000
4.	Tampah (Cecempeh)	Tampah yang terbuat dari hasil anyaman bambu lokal UMKM Desa Tapos 1	Rp18.000
5.	Hihid (Kipas Bambu)	Kipas bambu atau hihid kuat dan kokoh produk asli hasil karya UMKM Tenjolaya	Rp4.000- Rp9.000
6.	Sangku Nasi	Kerajinan dari anyaman bambu sangat cocok untuk menggambarkan nuansa	Rp20.000
7.	Kerudung	Kerudung dengan bahan kain premium diamond isabella dan memiliki berbagai model	Rp17.000
8.	Mainan Truk	Mainan hasil karya UMKM Tenjolaya, Bogor. Terbuat dari spons bekas	Rp17.000

Sumber Data : <http://tapossatu.com>

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Keadaan Indeks Ketahanan Sosial

Tabel 4.4 : Keadaan Indeks Ketahanan Sosial

Dimensi	Perangkat Indikator	Indikator per item	Nilai
Kesehatan	Pelayanan kesehatan	Jarak sarana kesehatan terdekat	1,00
		Ketersediaan tenaga kesehatan (bidan, Dokter dan Nakes lain)	0,47
	Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan	Akses ke poskesdes, polindes atau posyandu	1,00
		Tingkat aktivitas posyandu	1,00
	Jaminan kesehatan	Tingkat Kepesertaan BPJS	0,60
Pendidikan	Akses pendidikan dasar menengah	Akses pendidikan Dasar SD/MI < 3 km	1,00
		Akses pendidikan SMP/MTs < 6 km	1,00
		Akses pendidikan SMA/SMK/MA < 6 km	1,00
	Akses pendidikan non formal	Kegiatan PAUD	1,00
		Kegiatan PKMB/Paket A-B-C	1,00
		Kegiatan Kursus	1,00
	Akses pengetahuan masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	0,20
Modal Sosial	Solidaritas Sosial	Kebiasaan Gotong Royong	1,00
		Keterbukaan Ruang Publik	0,20
		Terdapat kelompok olahraga	0,80
		Terdapat kegiatan olahraga	0,80
	Toleransi	Keragaman suku/etnis di desa	0,20
		Bahasa sehari-hari warga desa	1,00
		Agama mayoritas warga desa	0,20
	Rasa Aman Warga Desa	Tersedianya sarana pos kamling di Desa	1,00
		Partisipasi warga siskamling	1,00

		Kejadian perkelahian massal di desa	1,00
	Kesejahteraan Sosial	Terdapat akses ke sekolah luar biasa	1,00
		Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (Anjal dan Pengemis)	0,80
Permukiman	Akses Air Bersih Dan Layak Minum	Mayoritas warga memiliki sumber air layak minum	1,00
		Akses warga memiliki air mandi dan mencuci	1,00
	Akses Ke Fasilitas Sanitasi	Mayoritas warga memiliki jamban	1,00
		Terdapat pembuangan sampah	1,00
	Akses ke fasilitas listrik	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik	1,00
	Akses Fasilitas Informasi Dan Komunikasi	Warga memiliki telepon seluler dan sinyal kuat	1,00
		Akses internet di kantor desa	1,00
		Terdapat akses internet untuk warga	1,00
IKS 0,834			

4.2.2. Keadaan Indeks Ketahanan Ekonomi

Tabel 4.5 Keadaan Indeks Ketahanan Ekonomi

Dimensi	Perangkat Indikator	Indikator per item	Nilai
Keragaman Produksi	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	1,00
Perdagangan	Tersedianya Pusat Perdagangan	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen)	1,00
		Terdapat pasar desa	0,20
		Terdapat sektor perdagangan (warung minimarket)	1,00
Akses Distribusi	Akses Distribusi Logistik	Terdapat kantor pos dan jasa logistik	0,00
Akses Kredit	Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	Tersedianya lembaga perbankan umum dan bpr	0,00
		Akses penduduk ke kredit	0,40

Lembaga Ekonomi	Lembaga Ekonomi	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/bumdes	0,60
		Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan	1,00
Keterbukaan Wilayah	Keterbukaan Wilayah	Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi)	0,60
		Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1,00
		Kualitas jalan desa	1,00
IKE		0,65	

4.2.3. Keadaan Indeks Ketahanan Lingkungan

Tabel 4.6 Keadaan Indeks Ketahanan Lingkungan

Dimensi	Perangkat Indikator	Indikator per item	Nilai
Kualitas Lingkungan	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	0,60
Potensi Dan Tanggap Bencana	Potensi Rawan Bencana	Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	0,80
	Tanggap Bencana	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	1,00
IKL		0,80	
IDM		0,7614	
Status IDM		Maju	

Sumber <https://idm.kemendesa.go.id/>

Dengan kesimpulan status atau posisi terakhir IDM Desa Tapos I yaitu berada di posisi status Maju berdasarkan Indeks Komposit IDM dengan Nilai 0,7614. Target kedepanya untuk desa tapos I agar bisa menuju tahap status mandiri harus bisa memperbaiki indikator-indikator yang kurang seperti yang telah diuraikan.

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan data hasil penelitian yang didapatkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data utama bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan di lapangan.

1. Bagaimana tingkat kematangan implementasi SPBE pada Pemerintah Desa Tapos Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat?

Informan yang pertama kepala camat tenjolaya yaitu Bapak Farid Ma'ruf

Untuk kematangan SPBE ini Sangat membantu, sekarang sudah era digital ada hal-hal tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu khususnya menyangkut bidang pelayanan itu akan sangat menunjang ketika masuknya teknologi digitaslisasi sehingga memudahkan dan mempercepat pelayanan. Outputnya tercipta berbagai macam efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di bidang pelayanan, pembangunan, kemasyarakatan. Makanya di kita belum seutuhnya pemerintahan ini dijalankan dengan sistem digitalisasi atau berbasis elektronik belum seluruhnya baru parsial hanya beberapa bidang saja yang sudah digitalisasi.

Sedangkan menurut pandangan Bapak Maman Nuriman selaku kepala desa Tapos I untuk meningkatkan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah desa harus mampu mengelola potensi yang ada dengan penggunaan cara pelaporan secara elektronik berikut penjelasan menurut Informan yang kedua di wawancarai yaitu kepala Desa Tapos I yaitu Bpk Mamamn Nuriman

“kita benar benar harus berhati-hati menjalankan roda pemerintahan desa, roda kepemerintahan desa itu benar-benar kita harus bersatu baik dengan aparaturnya pemerintah lingkungan RT RW dan Dusun kita benar-benar, kita

bersinergi untuk mengelolah spek-spek yang ada di wilayah tersebut.

Benar-benar harus rapi, harus matang melalui tahap permusyawaratan”

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah mulai digunakan di desa tapos I dengan penggunaan aplikasi seperti yang dijelaskan menurut Bapak Ukar selaku sekretaris desa sebagai Informan yang ke tiga.

“Untuk periode yang sekarang semuanya itu (pembuatan Laporan) baik dengan kinerja pemerintahan dan kemudian laporan keuangan di sampingnya itu kita membuat laporan secara manual dan kita juga wajib melaporkan itu dengan aplikasi atau laporan yang berbasis elektronik, dengan sistem yang masing-masing sudah dibuatkan sesuai dengan aturan pemerintahan misalkan untuk sistem pelaporan keuangan manual kita juga melaporkan dengan aplikasi ada namanya Sistem Keuangan Desa (SISKEDES), kemudian untuk kependudukan ada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), kemudian untuk laporan profil dan pengembangan desa ada namanya Indeks Desa Membangun (IDM) alhamdulillah semuanya sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku”

Begitupun yang dijelaskan menurut Informan yang ke empat di wawancara yaitu Kepala Seksi Pelayanan yaitu Ibu Ika Kartika

“Untuk sistem pelaporan atau aplikasi kebanyakan sekarang desa menggunakan aplikasi baik dari keuangan, dari pelaporan kependudukan, laporan inventaris barang, laporan pembangunan sekarang kita menggunakan aplikasi. Model keuangan ada dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEDES), Indeks Desa Membangun (IDM), Sistem informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan masih banyak lagi aplikasi yang digunakan oleh desa-desa khususnya desa tapos satu”

Untuk meningkatkan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini juga bisa di ukur dari kapasitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai teknologi seperti yang dijelaskan menurut pendapat Ibu putri sebagai Kepala Urusan Keuangan Pada Desa Tapos I beliau menjelaskan bahwa

“Di era sekarang eranya teknologi jadi untuk penguasaan teknologi di desa tapos I sudah cukup bagus jadi untuk perkembangan atau data-data yang diinput itu bisa terupdate”

Dan Menurut informan yang berikut terkait dengan tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ini yang mana disampaikan menurut Bapak Mad Soleh sebagai Pendamping Lokal Desa Kecamatan Tenjolaya.

“Artinya dengan digital elektronik yang berbasis pemerintahan ini sangat mendukung pemerintah dalam mengatasi masalah masalah dalam administrasi”.

Sedangkan menurut Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu Bpk Andri beliau mengatakan bahwa untuk kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di desa tapos sendiri ini tentunya sangat membantu pemerintah desa dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

“Masyarakat sekarang itu dituntut dalam iptek bukan hanya secara manual saja tapi secara teknologi juga itu sebagai salah satu penunjang apalagi sebenarnya sudah menjadi kebutuhan di setiap instansi-instansi pemerintahan dan, untuk di wilayah desa tapos I sendiri mulai dari SISKUDES itu sudah mulai berbasis online dari tiap-tiap instansi ada aplikasi nya contohnya khusus pendaftaran pernikahan, khusus penginputan pengajuan bantuan. Jadi memang kita langsung dor to dor dengan menggunakan aplikasi yang memang diberikan dari pusat sebagai penunjang masyarakat, misalnya dari kemensos turunkan aplikasi bantuan dengan format a,b,c jadi kita langsung datangi ke rumah lihat kondisinya layak apa tidak untuk mendapatkan bantuan, jadi disamping sistem pemerintahan berbasis elektronik ini memang sangat menunjang. Di wilayah desa tapos I karna semua berbasis online sekarang, jadi memang bukan hanya menjadi kebutuhan sekunder tapi memang sudah menjadi kebutuhan khusus.”

Informan yang ke enam di wawancarai yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yaitu Kaka Sandi Mulyono

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini sangat membantu di desa kami karena dengan berbagai macam aplikasi dapat membantu kami dalam pelaporan yang dulunya masih manual sekarang sudah menggunakan aplikasi dan itu yang diterapkan di desa kami saat ini”.

Informan yang ke tujuh di wawancarai yaitu Bpk M Anggara selaku ketua RW 06 Desa Tapos I

“Untuk tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik sendiri masyarakat kami masih banyak yang kurang memahami bahasa elektronik kalau hanya digunakan oleh perangkat pemerintah desa masih bisa karena untuk elektronika sendiri bisa digunakan untuk anak SMA sederajat yang magang di kantor desa itu lebih cepat memahami.”

Informan yang ke delapan di wawancarai yaitu Ibu Wati selaku masyarakat Desa Tapos I

“Alhmdulilla dengan teknologi ini pelayanan sudah cepat misalnya kalau mau buat KTP.”

2. Bagaimana upaya pemerintah Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam mengembangkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan desa dengan status desa mandiri dengan menggunakan aplikasi idm.kemendesa.go.id?

Informan yang pertama di wawancarai yaitu Camat Tenjolaya yaitu Bpk Farid Ma`ruf beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu pegangan kami di kecamatan untuk merancang pembangunan itu berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang sekarang sudah digitalisasi jadi untuk mempercepat pembangunan di desa itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di Desa Tapos I dan kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan desa supaya desa bisa maju dengan status mandiri.”

Sedangkan menurut Kepala Desa Tapos I sebagai Informan yang ke Dua yaitu Bpk Maman Nuriman

“Sebetulnya upaya yang sedang kita lakukan di lingkungan ini harus menciptakan sarana dan prasarana di masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang benar-benar positif baik di lingkungan, di pertanian, baik di wilayah-wilayah dan kita melihat dari ukuran itu untuk meningkatkan sumber daya yang ada di desa tapos I harus di tingkatkan jadi, apa yang di desa harus benar-benar kita gali. Kita bersatu dari karang taruna anak-anak muda untuk bersatu dalam menciptakan lapangan pekerjaan.”

Informan yang ke tiga di wawancarai yaitu Sekretaris Desa Tapos I yaitu Bpk Ukar

“Kalau pengembangannya kita dalam tahapan-tahapan yang real sesuai dengan perkembangan yang terjadi artinya ketika kita mau meningkatkan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri ada tahapan-tahapan sistem yang harus kita buat, sebelum dimasukan ke sistem contohnya IDM itu harus sesuai dengan perkembangan yang ada jadi tidak serta-merta kita mengada-adakan demi terciptanya desa sebagai desa mandiri tidak seperti itu. Ketika semua indikator yang harus dimasukan sehingga bisa menjadikan desa dengan status desa mandiri itu sesuai dengan indikator. Kita dari desa maju harus memasukan apa sehingga menjadi desa mandiri misalnya di desa tapos I belum ada dokter, ketika ada dokter berarti kita masukan sesuai dengan indikator khususnya di kesehatan, kemudian koperasi dan lain sebagainya. penunjang-penunjang sehingga yang akan membuat desa menjadi desa mandiri apa saja? Kalau itu memang ada sesuai kita akan masukan dengan sendirinya sistem akan membaca secara otomatis bahwa desa ini sudah bisa disebut desa mandiri.”

Untuk mengembangkan sumberdaya yang ada pada desa tapos I maka harus meningkatkan tingkat pendidikan karena ini salah satu faktor agar supaya bisa mengembangkan sumberdaya manusia yang dibutuhkan ke dalam IDM seperti yang dijelaskan Informan yang ke empat di wawancarai yaitu Kepala Seksi Pelayanan yaitu Ibu Ika Kartika

“Upaya desa tapos I untuk pengembangan ada tiga faktor yaitu faktor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dengan seperti itu maka level desa akan naik ke tingkat desa mandiri. Dengan pendidikan yang direncanakan pemerintah dengan pendidikan 9 tahun nanti secara berjenjang untuk masyarakat sampai 12 tahun sampai SLTA, kalo untuk kesehatan banyak model posyandu lebih di jalankan lagi dan laporan posyandu pun dengan menggunakan aplikasi model Sistem Informasi Posyandu (SIMADU). Kalau untuk kesejahteraan tingkat pendapatan masyarakat masih rendah, desa tapos I masi rata-rata di bawah untuk tingkat pendapatan masyarakat dengan mata pencaharian sebagai buruh tani bukan sebagai petani.”

Kemudian Informan yang berikut dijeaskan oleh Ibu Kepala Urusan Keuangan desa tapos I terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan sumber daya beliau selaku informan yang kelima berpendapat bahwa

“Kalau untuk sekarang dengan perkembangan teknologi dapat memudahkan kita dalam berbagai informasi dengan begitu kita tidak perlu mengikuti studi banding jauh-jauh lagi tapi kalau untuk sekarang kita sedang dalam pengembangan sumberdaya manusianya”

Adapun pendapat menurut Pendamping Lokal Desa Bapak Mad Soleh mengenai upaya meningkatkan sumber daya yaitu

“dengan dana desa harus bisa meningkatkan 4 aspek yaitu lingkungan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur karena dengan

peningkatan inilah desa bisa menjadi desa mandiri dan secara otomatis dinilai dalam Indeks Desa Membangun”

Informan yang ke enam di wawancarai yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu Bpk Andri

“Untuk di wilayah desa tapos satu sendiri letak desa kita berada paling ujung yang berbatasan langsung gunung salak, dari kemajuan teknologi, maupun sumber daya manusianya itu sendiri semakin meningkat karena di satu sisi kita di tunjang juga dengan sekolah-sekolah yang sangat dekat untuk peningkatan sumber daya manusianya. Di wilayah desa tapos I untuk mengembangkan desa ini biar menjadi desa yang maju banyak potensi yang belum tergali, sebagian masyarakat banyak yang berpikir jika mereka ke luar (kota) mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka sedangkan di wilayah desa tapos I sendiri banyak potensi yang memang belum digali, baik dari faktor wisata memang di sini untuk wisatanya banyak tapi untuk pengembangannya atau cara mempromosikannya memang masih belum terlalu terlihat. Padahal di wilayah desa tapos I sendiri banyak destinasi wisata yang bisa bersaing dengan wilayah wilayah lain. Oleh sebab itu pemerintah desa sedang berupaya dengan meningkatkan potensi sumberdaya manusianya.”

Informan yang ke tujuh di wawancarai yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yaitu Kaka Sandi Mulyono

“Untuk pembangunan yang sedang diupayakan di desa kami, mungkin sumber daya manusia sedang digarap karena sumber daya manusia sudah tidak mencukupi; oleh karena itu, untuk menaikkan level desa, harus ada komunikasi dengan desa lain yang lebih maju atau mandiri agar bisa saling berbagi ilmu.”

Informan yang ke delapan di wawancarai yaitu Bpk M Anggara selaku ketua RW 06 Desa Tapos I

“Untuk sumberdaya yang dibutuhkan sendiri mungkin dari segi infrastruktur pembangunan sudah bagus dan itu yang sedang diupayakan pemerintah desa.”

Informan yang ke sembilan di wawancarai yaitu Ibu Wati selaku masyarakat Desa Tapos I

“Saya tidak tahu Tentang aplikasi Indeks Desa Membangun tapi kalau ada program atau sosialisasi dari desa kita juga ikut berpartisipasi sebagai masyarakat.”

Informan yang ke sepuluh di wawancarai yaitu Bapak Gusnadi selaku masyarakat Desa Tapos I

“Dalam hal upaya pemerintah desa sekarang sedang berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya dengan membangun sekolah.”

Informan yang ke sebelas di wawancarai yaitu Ibu Jainap selaku masyarakat Desa Tapos I

“Upaya pemerintah dalam mengembangkan suber daya ada seperti bantuan, kadang kadang suka ada sih bantuan yang di kasi dari desa seperti beras.”

Informan yang keduabelas di wawancarai yaitu Ibu Lewi selaku masyarakat Desa Tapos I mengatakan bahwa

“saya tidak tahu hanya kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga biasa juga ada yang nyuruh kula kuli jadi pendapatan saya cuman dari nanam padi sama bajak rumput buat memberi makan ternak punya orang kalau untuk potensi saya tidak tahu”

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mengembangkan desa dengan menggunakan website idm.kemendesa.go.id?

Informan yang pertama di wawancarai yaitu Camat Tenjolaya yaitu Bpk Farid Ma'ruf

“Pendukungnya di kita SDM sudah sangat mendukung, perangkat juga meskipun masih sangat terbatas itu sangat mendukung kemudian program-program kebijakan implementatif yang diterbitkan baik dari pusat provinsi maupun kabupaten sudah sangat tersedia tinggal kenapa kita belum secara utuh? Karena pertama, contoh untuk urusan kemasyarakatan ini tidak bisa semuanya berlaku SPBE kongkritnya yang namanya urusan masyarakat itu bukan hanya berbicara hubungan antara pemerintah dengan masyarakat tetapi lebih banyak juga hubungan emosional yang tdk bisa di wakikan oleh teknologi apapun, dan mau tidak mau harus muncul hubungan secara langsung antara pemerintah dan masyarakat. Kalau ada masyarakat yang sakit, ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan itu tidak mungkin diwakikan melalui teknologi itu harus melalui sentuhan langsung, ketika ada kejadian bencana untuk sistem pelaporan sistem informasi bisa kita lakukan secara digitalisasi tapi, kalau untuk penanganan itu tdk mungkin. Dalam tata kelola masyarakat untuk kita menerapkan nilai-nilai sosial ini juga sulit kalau hanya sebatas pendataan, pelaporan yang sifatnya administratif dan pelayanan tertentu ini bisa tapi kalau untuk yang lain ini kita masih jauh dari kata digitalisasi. Faktor penghambat yang kedua adalah faktor alam kalau di wilayah kami di kecamatan tenjolaya ini masuk di daerah yang kontur tanahnya secara geografis masuk di area pegunungan kemudian fasilitas-fasilitas teknologi belum masuk semua. Ketika peran teknologi membutuhkan koneksi internet di wilayah kita belum seluruhnya itu terjangkau internet. Faktor ketiga masyarakat di kami juga belum memiliki perangkat hp komputer untuk bisa mengakses pelayanan pemerintah dengan basis elektronik masyarakat di kami tingkat pendidikannya juga belum sepenuhnya menguasai arus teknologi, jadi masih ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai teknologi sehingga tetap harus melakukan supervisi. Jadi sistem ini bukan hanya bagaimana dijadikan oleh pemerintah akan tetapi bagaimana juga diterima oleh masyarakat pemerintah sudah siap SDMnya perangkatnya tetapi di sisi lain masyarakat sebagai objek yang harus dilayani juga masih terkendala”

Informan yang ke dua di wawancarai yaitu kepala Desa Tapos yaitu Bpk Mamam Nuriman

“Faktor pendukung di Desa Tapos sendiri memang dengan menggunakan Sistem IT *Information Technology* sangat membantu khususnya untuk IDM berdasarkan situasi dan keadaan di desa ini diukur dari ketahanan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam proses perancangan program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penghambat sendiri sejauh ini belum ada. Hanya SDM kami belum memadai makanya kami sedang mengupayakan mengembangkan SDM dari segi pendidikan”

Informan yang ke tiga di wawancarai yaitu Sekretaris Desa Tapos I yaitu Bpk Ukar

“Faktor pendukung secara dari aplikasinya sendiri sudah baik sangat membantu desa dengan bisa melihat status desa dengan cara pengaplikasian yang sangat mudah dan untuk faktor penghambat sejauh ini belum ada hambatan kalau kita memasukan data sesuai dengan kenyataan yang ada tidak ada hambatan paling hambatannya di aplikasinya secara aplikasi ini dipakai secara nasional, paling di sistemnya yang nanti bermasalah”

Salah satu penunjang dan faktor pendukungnya dilihat dari perkembangan digital sekarang sangat membantu khususnya dalam aplikasi Indeks Desa Membangun menurut Informan yang ke empat diwawancarai yaitu Kepala Seksi Pelayanan yaitu Ibu Ika Kartika Ibu menjelaskan bahwa:

“Untuk masalah pendukung sekarang desa-desa sudah didukung dengan aplikasi, dengan jaringan internet kalo untuk penghambatnya sendiri adalah SDM sendiri misalkan kita desa tapos I staf rata-rata SMA hanya beberapa orang yang sebagian D3 dan S1”

Jawaban yang hampir sama juga disampaikan menurut Ibu Putri selaku Kepala Urusan Keuangan :

“dengan teknologi sekarang kita dapat berbagi pengetahuan dan juga teknologi dapat membantu pemerintah untuk membagi dan menerima informasi tanpa batas”

Informan yang ke enam di wawancarai yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan

Rakyat yaitu Bpk Andri

“Faktor penghambat dalam aplikasi biasanya ketika kita memakai aplikasi suka terkendalanya dari sinyal, terkadang kondisi internet juga tergantung dari cuaca kalau memang disini cuacanya cukup mendung sinyalnya agak lemah walaupun di sini menara signal tinggi-tinggi. Untuk faktor yang lainya mungkin dari pemadaman listrik, kalau untuk aplikasinya biasanya terkendala di server utamanya kadang prosesnya memakan waktu yang cukup lama karena aplikasi ini yang digunakan bukan hanya satu desa tapi seluruh desa yang ada di indonesia”

Informan yang ke tujuh di wawancarai yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan

Umum yaitu Kaka Sandi Mulyono

“masalahnya adalah kesalahan yang paling umum, itu karena program IDM itu sendiri digunakan oleh banyak Pemerintah khususnya desa, bukan hanya satu”

berikutnya faktor pendukung dan penghambat yang di jelaskan menurut pendapat pendamping lokal desa kecamatan tenjolaya yaitu Bapak Mad Soleh selaku informan ke delapan beliau menjelaskan bahwasanya

“penghambat dalam penginputan data dalam aplikasi website Indeks Desa Membangun terkendala di sinyal yang belum cukup kuat, dan untuk pendukungnya Dengan indeks desa membangun ini kita dapat melihat sudah sejauh mana desa kita diklasifikasikan dengan 5 status dari Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri”

Informan yang ke sembilan di wawancarai yaitu Bapak M Anggara selaku ketua RW 06 Desa Tapos I

“Bahasa elektronika yang masih belum dipahami oleh masyarakat dan kekurangan sumber daya manusia dalam memahami bahasa elektronika itu faktor penghambatnya. Dan faktor pendukungnya itu dengan berbagai

macam elektronika yang diciptakan lewat berbagai aplikasi ini dapat membantu berjalannya sistem pemerintahan yang ada di desa kami dan sekarang sudah mulai banyak anak lulusan SMA juga yang sudah bisa minimal sekarang sudah punya hp sudah bisa”

Sedangkan masyarakat belum tahu apa yang harus dikembangkan pada desa mereka sehingga bisa menuju ke desa mandiri jadi belum paham betul tentang aplikasi atau digitalisasi seperti yang dijelaskan pada Informan yang ke sepuluh di wawancara yaitu Ibu Wati selaku masyarakat Desa Tapos I

“Saya tidak tahu tentang apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam aplikasi Indeks Desa Membangun”

Informan yang ke sebelas di wawancara yaitu Bapak Gusnadi selaku masyarakat Desa Tapos I

“Untuk menjadi desa mandiri mungkin belum bisa karena kita masih kurang di sumberdaya manusianya”

Informan yang keduabelas di wawancara yaitu Ibu Jainap selaku masyarakat Desa Tapos I

“Saya tidak tahu tentang aplikasi Indeks Desa Membangun Dan Faktor-faktor yang menjadi penghambatnya”

Setelah melakukan wawancara di atas peneliti juga memperoleh data IDM dari pemerintah desa tapos I Tahun 2021 dan 2022 yang menunjukkan bahwa

Tabel 4.7 : Data IDM Tahun 2021

Indikator	Nilai
Indeks Ketahanan ekonomi	0,63
Indeks Ketahanan Sosial	0,80
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,46
Status IDM Berkembang	0,6333

Tabel 4.8 : Data IDM Tahun 2022

Indikator	Nilai
Indeks Ketahanan ekonomi	0,65
Indeks Ketahanan Sosial	0,83
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,80
Status IDM Maju	0,7614

Dari perbandingan data Indeks Desa Membangun pada desa tapos yang mana pada data 2022 sudah mulai meningkat dari ketiga indikator yang menjadi tolak ukur status kemandirian desa. Dan desa tapos I mencapai status desa sebagai desa maju.

4.3. Pembahasan Temuan Penelitian

Pembahasan dari Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Pelayanan Desa Melalui Pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun Di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor belum terlalu matang karena dilihat dari akses jaringan terkadang mengalami gangguan. dilihat dari 4 aspek penelitian dengan indikator menurut Riant Nugroho (2004:163) yang dikaitkan dengan tiga indeks komposit IDM yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Implementasi strategi

Implementasi strategi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pelayanan Desa Melalui Pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun pada Desa tapos I sebagai tolak ukur tingkat kematangan implementasi pada desa tapos I sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang dimana desa tapos belum cukup matang dalam kematangan karena dilihat dari kualitas jaringan dan proses pelaporan yang mana biasanya terjadi kesalahan sistem pada aplikasi khususnya dalam aplikasi Indeks Desa Membangun yang mana hal ini terjadi dari situs dari pusat. dengan melihat dari potensi yang dimiliki desa tapos I sesuai realita yang mana dilihat dari 3 indeks komposit yang dibentuk oleh Indeks Desa Membangun yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi

dan Indeks Ketahanan Ekologi. Dengan melihat dari indikator-indikatornya :

a. Perencanaan

Dalam perencanaan peningkatan kematangan spbe pada desa tapos 1 dengan menggunakan aplikasi IDM ini maka perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa adalah meningkatkan potensi sumberdaya manusia dan ekonomi masyarakat sesuai pada komponen yang dibutuhkan di dalam Indeks Desa Membangun mulai dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ekologi masyarakat.

b. Struktur Organisasi

Perangkat desa Tapos 1 dan Kepala Desa berperan penting dalam organisasi pemerintahan desa untuk meningkatkan potensi sumberdaya manusia dalam indeks desa membangun maka semua perangkat desa didampingi pendamping desa dan didampingi oleh kecamatan Tenjolaya sebagai verifikator terlibat dalam meningkatkan potensi dan melaporkan data IDM sesuai realita dan potensi yang dibutuhkan.

c. Sumber daya Manusia

Sumber daya Manusia di Desa tapos I belum cukup untuk memahami Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Pengorganisasian

Perorganisasian pada desa tapos I dalam pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun mulai dari Kepala Desa sampai kepada Perangkat Desa

serta Pendamping lokal desa untuk menetapkan tujuan agar desa bisa menjadi lebih mandiri harus meningkatkan Sumber daya Manusia.

a. Menetapkan Tujuan

Untuk meningkatkan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan pengembangan aplikasi indeks desa membangun maka yang ditetapkan adalah tujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi desa tapos yang perlu ditingkatkan demi terciptanya tujuan dari Indeks Desa Membangun,

b. Menetapkan tugas tugas pokok anggota organisasi

Pemerintah desa tapos dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya dalam hal ini potensi ekonomi dan sumber daya manusianya maka kepala desa dan perangkat desa memiliki tugas pokok sebagaimana terdapat dalam Peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

c. Melakukan tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci

Agar supaya tercapainya tujuan desa menjadi Mandiri dengan indeks desa membangun.

d. Mengalokasikan sumberdaya yang tersedia

Sumberdaya yang tersedia digunakan untuk meningkatkan potensi yang ada pada desa tapos I melalui pengembangan sumberdaya manusia dengan melakukan pembangunan sekolah-sekolah dan menambah pengetahuan kepada masyarakat akan perkembangan digitalisasi serta menumbuhkan

ketahanan ekonomi pada masyarakat agar dapat menambah nilai pada Indeks Desa Membangun.

3. Penggerakan dan kepemimpinan

Dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelayanan desa melalui pengembangan aplikasi Indeks Desa Membangun pemerintah desa harus mampu menggerakan masyarakat agar dapat bekerja sama demi tercapainya tujuan mengembangkan potensi desa melalui Indeks Desa Membangun dengan indikator sebagai berikut:

a. Membuat keputusan dan mencari solusi dalam permasalahan

Di era Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi ini maka seluruh perangkat desa dan kepala desa harus mampu menguasai teknologi dalam bidang pemerintahan lebih khususnya pada aplikasi Indeks Desa Membangun karena dengan menguasai teknologi yang menjadi tolak ukur pada SPBE maka dari itu kepala desa tapos I bersama perangkat desa baik sampai ke tingkat Rt/Rw benar-benar harus bersatu bersinergi untuk mengelolah spek-spek yang ada di wilayah Desa Tapos I tersebut.

b. Menjadi inspirasi

Untuk pengembangan Indeks Desa Membangun ini maka kepala desa harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat.

c. Tumbuhkan motivasi

Selain menjadi inspirasi maka harus ada motivasi yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa dalam menumbuhkan motivasi dalam hal

pengembangan dengan mengembangkan potensi sumberdaya manusia dengan ekonomi masyarakatnya dengan cara sosialisasi

d. Komunikasi yang baik.

Komunikasi yang baik juga harus dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat agar dapat terwujudnya desa menjadi desa mandiri dengan indeks desa membangun dan dapat terciptanya pemenuhan sumberdaya dan ketahanan ekonomi pada masyarakat desa tapos I.

4. Pengendalian

Pemerintah desa tapos I dalam pengendalian akan penggunaan pelayanan menggunakan menggunakan aplikasi khususnya Indeks Desa Membangun melalui website idm.kemendesa.go.id dengan mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan ekonomi masyarakat yang dibutuhkan maka pemerintah desa tapos I untuk meningkatkan kedua indikator dalam IDM ini maka penetapan pengendalian dilakukan yaitu:

- a. Penetapan standard dan metode penilaian kinerja
- b. Penilaian kinerja sesuai standar
- c. Pengambilan tindakan koreksi.

4.3.1. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan sosial mendapatkan nilai IDM pada tahun 2021 yaitu 0,80 kemudian pada tahun 2022 mendapatkan nilai 0,83 yang mewujudkan bahwa nilai IKS desa tapos I dari yang berkembang pada tahun 2021 sampai sekarang menuju status maju pada tahun 2022 ketahanan pelayanan sosial pada desa tapos I perlu dipertahankan agar masyarakat desa tapos I tidak merasa kekurangan

perhatian dari pemerintah desa tapos I, yang mana terdapat 1 puskesmas dan tersedianya 1 sarana tempat praktek bidan dan 7 posyandu. adapun proses perencanaan pembangunan akses jalan menuju tempat wisata.

4.3.2. Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks ketahanan ekonomi menjadi indikator dengan nilai terendah pada tahun 2022 dengan nilai 0,65 yang menunjukkan perkembangan hampir tidak nampak. IKE perlu ada perhatian khusus dari pemerintah desa tapos I dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

4.3.3. Indeks Ketahanan Lingkungan

Indeks ketahanan lingkungan menjadi indikator dengan nilai 0,80 yang menunjukkan bahwa indeks ketahanan lingkungan desa tapos I menjadi indikator tertinggi setelah indikator ketahanan sosial. Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam pada tahun 2022 mendapatkan nilai 1,00 yang artinya tanggap bencana pada desa tapos I sangat baik. Dengan kualitas lingkungan pencemaran air, tanah dan udara mendapatkan nilai 0,60 ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menyadari kalau membuang sampah di kali itu dapat mencemarkan air. Untuk potensi rawan bencana Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan) sendiri mendapatkan nilai 0,80.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Manfaat SPBE dengan menggunakan aplikasi IDM dapat membantu pemerintah desa dalam pelaporan potensi yang ada di desa dan masyarakat juga bisa melihat tingkat kemandirian desa melalui website idm.kemendesa.go.id. Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Desa Tapos I dengan pengembangan aplikasi Indeks Desa Membangun berada pada klasifikasi Desa Maju dengan skor IDM 0,7614. Penggunaan aplikasi pemerintahan yang berbasis elektronik sudah baik namun dari segi aplikasinya masih terkendala pada saat proses pengiriman data ganguanya dari aplikasinya sendiri ini terjadi karena penuhnya *traffic* kunjungan yang terlalu banyak sehingga *server down* khususnya aplikasi Indeks Desa Membangun.
2. Upaya pemerintah Desa Tapos I dalam mengembangkan sumberdaya yang di butuhkan melalui IDM masih belum cukup karena kekurangan sumberdaya manusia akan pengetahuan dan ekonomi masyarakat
3. Faktor penghambat dalam upaya memngembangkan desa menjadi desa mandiri dengan menggunakan aplikasi IDM pada desa tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor di sebabkan karena jaringan internet yang belum terlalu kuat di beberapa wilayah. Faktor pendukungnya pemerintah desa dengan adanya aplikasi ini sistem pelaporanya sangat cepat dan sistematis di dalam aplikasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait dengan memaksimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pengembangan aplikasi Indeks Desa Membangun

1. Pemerintah desa dan perangkat desa harus menyampaikan aspirasi tentang kesalahan yang sering terjadi di dalam aplikasi melalui tingkatan pemerintah bupati sampai ke tingkat provinsi dan kemudian disampaikan ke pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas dalam aplikasi Indeks Desa Membangun.
2. Untuk meningkatkan potensi sumberdaya manusia harus membangun sekolah-sekolah dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya teknologi di jaman sekarang dan juga mendorong masyarakat melalui pengembangan ekonomi melalui wisata. Adapun usaha pemerintah Desa Tapos I untuk meningkatkan IKE yaitu bermitra dengan BUMDEs Desa Tapos I untuk mendirikan beberapa usaha seperti Usaha Budidaya ikan nila, budidaya ikan lele yang nantinya dikembangkan oleh anak muda Desa Tapos I melalui karang taruna.
3. Pemerintah desa harus mengajukan pembangunan menara jaringan ke tingkat pemerintah kabupaten ataupun swasta untuk wilayah yang belum tersentuh oleh jaringan agar bukan hanya kebutuhan pemerintah desa yang terpenuhi akan tetapi kebutuhan masyarakat juga bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R. 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Yogyakarta
- Diskominfo. 2017. *Pengertian, keuntungan & kerugian E government*.
Dikutip dari: <https://dikominfo.bandungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government>.
Diakses 23 Oktober 2022
- Dosen pendidikan 2022. *13 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli*
Dikutip dari: <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli/>. Diakses 23 Oktober 2022
- Eviana Septiana Rachman, & Beni Noviyanto. 2017. *Pemanfaatan E-Government Pada Desa Wonokarto Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Informasi Potensi Desa*. Dikutip: <https://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/download/86/80> (23 Oktober 2022)
- Faki Zainul Wildan. 2019. *Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE*
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99193/WILDAN%20ZAINUL%20FAKI-152410101007%20%23.pdf?sequence=1&isAllowed=yC>.
Diakses 4 Januari 2023.
- Indeks Desa Membangun. 2022. Rekomendasi Data Desa . Di kutip dari Idm.kemendesa.go.id. diakses 6 Februari 2022
- Indrajit Eko R., Zainuddin Akbar, Rudianto Dudy 2005 *e-Government in Action* Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003; Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Kementrian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2016. *15.000 Desa Sasaran Prioritas (berdasarkan data Indeks Desa membangun)*
Dikutip dari: <https://kemendes.go.id/berita/assets/images/gallery/einfohttps/RapatDiseminasiIDM.pdf> Diakses 24 Juni 2023.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP

Muhyiddin Achmat, & Darmawan Irwan. 2021. *Sistem Informasi Idm (Indeks Desa Membangun) Berbasis Web Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Pmd) Kabupaten Sumenep*. Jurnal Insand Comtech, Vol. 6, Nomor 2. Dikutip dari: http://ejournal.unira.ac.id/index.php/insand_comtech/article/download/1422/890 (23 Oktober 2022)

Moenir. (2015), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Nur Muhamad. 2021 *Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks- Ng) Di Kabupaten Gowa*. Makasar. Universitas Muhamadia

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Tentang. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2016, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Portal pelayanan publik. 2020. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan, Tugas, Fungsi Hingga Jenisnya. Di kutip dari : <https://pelayananpublik.id/2020/06/15/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan-tugas-fungsi-hingga-jenisnya/>. Diakses 23 Oktober 2022.

Profil Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. 2022
di kutip dari: <https://tapossatu.com/> di akses 13 februari 2023

Silalahi, U. 2010. *Metode penelitian sosial / Ulber Silalahi ; editor, Aep Gunarsal*. Bandung: Refika Aditama

Suaedi, Falih., Wardliyanto, Bintoro. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan E-Government)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung

Suradinata Ermaya. 2002; *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. PT. Vidcodata : Jakarta

Sutardjo, Kartohadikusumo, 1953, *Desa*, Yogyakarta : Indonesia Monographs

Sutopo, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Tahapannya dalam Penelitian)*. Surakarta : Sebelas Maret Press.

Syafiie Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Syaodih Nana. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 18

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wibawa Samodra. 2009. *Administrasi Negara Isu-isu Kontenporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Yan Tirtobisono. 1999. *Aplikasi Travel Booklet Menggunakan Teknoligi Augmented Reality dan Location Based Service Berbasisi Windows Phone*. Perpustakaan UNIKOM.

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pedoman (observasi) yang dilakukan adalah mengamati pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun pada Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

1.1 Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data pengembangan aplikasi Indeks Desa Membangun dengan situs web idm.kemendesa.go.id di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

1.2 Aspek Yang Diamati

1. Lokasi Desa
2. Sistem kerja dalam aplikasi situs web idm.kemendesa.go.id
3. Sarana dan Prasarana membantu kinerja dalam aplikasi Indeks Desa Membangun
4. Pemerintahan Desa Tapos 1
5. Sipa saja yang berperan dalam membantu Desa untuk mencapai desa mandiri

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Sedangkan wawancaranya pada lokasi penelitian, yaitu di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun dalam melakukan penelitian ini, Peneliti juga menggunakan alat-alat dalam wawancara, yaitu: lembar pedoman wawancara, alat tulis, Tape Recorder, foto foto dan gambar yang terkait dengan proses penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi wawancara bertempat di : Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

3. Jenis Informan

- | | |
|--|-------|
| 1. Camat Tenjolaya | : R1 |
| 2. Pendamping Lokal Desa Kecamatan Tenjolaya | : R2 |
| 3. Kepala Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya | : R3 |
| 4. Sekretaris Desa Tapos I | : R4 |
| 5. Kepala Seksi Pelayanan Desa Tapos I | : R5 |
| 6. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tapos I | : R6 |
| 7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Tapos I | : R7 |
| 8. Kepala Urusan Keuangan Desa Tapos I | : R8 |
| 9. Rw 06 Desa Tapos I | : R9 |
| 10. Masyarakat | : R10 |

R = Informan

Lampiran 3

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

1. Informan I adalah Camat Tenjolaya Pada hari Rabu, 1 maret 2023

pukul 11:00 WIB bertempat di kantor kecamatan tenjolaya

Nama : Farid Ma`ruf

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 46 Thn

Jabatan : Camat

Pendidikan Terakhir: S-2

A. Apakah pelayanan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik sangat membantu?

Jawab : “Untuk kematangan SPBE ini Sangat membantu, sekarang sudah era digital ada hal-hal tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu khususnya menyangkut bidang pelayanan itu akan sangat menunjang ketika masuknya teknologi digitalisasi sehingga memudahkan dan mempercepat pelayanan. Outputnya tercipta berbagai macam efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di bidang pelayanan, pembangunan, kemasyarakatan. Makanya di kita belum seutuhnya pemerintahan ini dijalankan dengan sistem digitalisasi atau berbasis elektronik belum seluruhnya baru parsial hanya beberapa bidang saja yang sudah digitalisasi”.

B. Bagaimana camat menindaklanjuti pendataan melalui aplikasi

Indeks Desa Membangun ?

Jawab : “Indeks Desa Membangun ini berangkatnya dari fakta data yang berasal dari realita kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat, kondisi itu mencerminkan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan yang lain-lain sehingga pegangan kami untuk merancang pembangunan itu salah satunya berdasarkan dari IDM ini, jadi kalau IDMnya sudah tampil di kita, kita tinggal memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan desa

yang sudah tersusun rapi di dalam IDM. Salah satu bentuk digitalisasi untuk mempermudah proses perancangan program itu dari IDM karena IDM ini sudah berbentuk digitalisasi”.

C. Bagaimana upaya camat dalam menghadapi faktor penghambat dan pendukung dalam aplikasi IDM ini?

Jawab : “ Karena di wilayah kita kecamatan tenjolaya salah satu faktor penghambatnya belum semua wilayah di desa kami belum terfasilitasi dengan jaringan internet, coba kita ajukan sesegera mungkin mudah-mudahan bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten maupun dari pihak swasta, saya tidak peduli yang mau membangun baik dari pemerintah mau swasta yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi dan terfasilitasi. Itu salah satu upaya kita untuk meminimalisasi hambatan-hambatan terkait jaringan koneksi internet”

2. Informan II adalah kepala Desa Tapos Satu Pada hari Kamis, 9 februari 2023 pukul 11:06 WIB bertempat di kantor desa tapos I

Nama : Maman Nuriman

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur :

Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan Terakhir: S1

A. Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

Jawab : “kita benar benar harus berhati-hati menjalankan roda pemerintahan desa, roda pemerintahan desa itu benar-benar kita harus bersatu baik dengan aparatur pemerintah lingkungan RT RW dan Dusun kita benar-benar, kita bersinergi untuk mengelolah spek-spek yang ada di wilayah tersebut. Benar-benar harus rapi, harus matang melalui tahap permusyawaratan”

B. Upaya pemerintah desa tapos I dalam mengembangkan sumber daya yang dibutuhkan dalam mewujudkan dengan status desa mandiri?

Jawab : “Sebetulnya upaya yang sedang kita lakukan di lingkungan ini harus menciptakan sarana dan prasarana di masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang benar-benar positif baik di lingkungan, di pertanian, baik di wilayah-wilayah dan kita melihat dari ukuran itu untuk meningkatkan sumber daya yang ada di desa tpos I harus di tingkatkan jadi, apa yang di desa harus benar-benar kita gali. Kita bersatu dari karang taruna anak-anak muda untuk bersatu dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

C. dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini sudah baik untuk pemerintah desa tapos I ?

jawab : “kalau sekarang ini memang kalau di ciptakan sistem secara elektronik ini saya sangat setuju karena jaman sekarang benar benar kita (pemerintah desa tapos I) berfokus ke bidang Informasi Telekomunikasi IT karena kalau kita belum memahami IT maka kita akan ketinggalan jejak untuk melangkah ke depan”

3. Informan III adalah Sekretaris Desa Tapos Satu Pada hari jumat, 10 februari 2023 pukul 10:52 WIB bertempat di kantor desa tapos I

Nama : Ukar Sukardi
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur :
Jabatan : Sekretaris Desa

Pendidikan Terakhir: S1

A. Apa saja penghambat dalam pelaporan urusan administrasi pemerintah desa ke dalam aplikasi IDM?

Jawab : “dari aplikasinya sendiri sudah baik sangat membantu desa dengan bisa melihat status desa dengan cara pengaplikasian yang sangat mudah dan untuk faktor penghambat sejauh ini belum ada hambatan kalau kita memasukan data sesuai dengan kenyataan yang ada tidak ada hambatan paling hambatannya di aplikasinya secara aplikasi ini dipakai secara nasional, paling di sistemnya yang nanti bermasalah.”

B. Apakah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik ini sudah berjalan dengan baik atau belum?

Jawab : “Untuk periode yang sekarang semuanya itu (pembuatan Laporan) baik dengan kinerja pemerintahan dan kemudian laporan keuangan di sampingnya itu kita membuat laporan secara manual dan kita juga wajib melaporkan itu dengan aplikasi atau laporan yang berbasis elektronik, dengan sistem yang masing-masing sudah dibuatkan sesuai dengan aturan pemerintahan misalkan untuk sistem pelaporan keuangan manual kita juga melaporkan dengan aplikasi ada namanya Sistem Keuangan Desa (SISKEDES), kemudian untuk kependudukan ada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), kemudian untuk laporan profil dan pengembangan desa ada namanya Indeks Desa Membangun (IDM) alhamdulillah semuanya sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

C. Bagaimana peningkatan yang dilakukan pemerintah desa tapos agar desa bisa diklasifikasikan menjadi desa mandiri melalui Indeks Desa Membangun?

Jawab : “Kalau pengembangannya kita dalam tahapan-tahapan yang real sesuai dengan perkembangan yang terjadi artinya ketika kita mau meningkatkan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri ada tahapan-tahapan sistem yang harus kita buat, sebelum dimasukan ke sistem contohnya IDM itu harus sesuai dengan perkembangan yang ada jadi tidak serta-merta kita mengadakan demi terciptanya desa sebagai desa mandiri tidak seperti itu. Ketika semua indikator yang harus di masukan sehingga bisa menjadikan desa dengan status desa mandiri itu sesuai dengan indikator. Kita dari desa maju harus memasukan apa sehingga menjadi desa mandiri misalnya di desa tapos I belum ada dokter, ketika ada dokter berarti kita masukan sesuai dengan indikator khususnya di kesehatan, kemudian koperasi dan lain sebagainya.

penunjang-penunjang sehingga yang akan membuat desa menjadi desa mandiri apa saja? Kalau itu memang ada sesuai kita akan masukan dengan sendirinya sistem akan membaca secara otomatis bahwa desa ini sudah bisa disebut desa mandiri.”

4. Informan IV adalah Kepala Seksi Pelayanan Desa Tapos Satu Pada hari Senin, 13 februari 2023 pukul 09:53 WIB bertempat di kantor desa tapos I

Nama : Ika Kartika

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 42

Jabatan : KASI Pelayanan Desa

Pendidikan Terakhir: SLTA

A. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan potensi sumberdaya yang ada di desa, agar desa dapat diklasifikasikan sebagai desa mandiri?

Jawab : “untuk partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik untuk pengembangan ada tiga faktor yaitu faktor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dengan seperti itu maka level desa akan naik ke tingkat desa mandiri.

B. Apa saja faktor pendukung dan penghambat khususnya dalam sistem kerja aplikasi Indeks Desa Membangun?

Jawab : “Untuk masalah pendukung sekarang desa-desa sudah didukung dengan aplikasi, dengan jaringan internet kalo untuk penghambatnya sendiri adalah SDM sendiri misalkan kita desa tapos I staf rata-rata SMA hanya beberapa orang yang sebagian D3 dan S1”

C. Sebagai seksi pelayanan desa dalam perangkat desa, bagaimana pelayanan dengan menggunakan sistem *E-governmet* dalam dalam situs web idm.kemendesa.go.id?

Jawab : “Untuk sistem pelaporan atau aplikasi kebanyakan sekarang desa menggunakan aplikasi baik dari keuangan, dari pelaporan kependudukan, laporan inventaris barang, laporan pembangunan sekarang kita menggunakan aplikasi. Model keuangan ada dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEDES), Indeks Desa Membangun (IDM), Sistem informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan masih banyak lagi aplikasi yang digunakan oleh desa-desa khususnya desa tapos satu”.

5. Informan V adalah Kepala Urusan Keuangan Desa Tapos Satu Pada hari Senin, 20 februari 2023 pukul 13:31 WIB bertempat di kantor desa tapos I

Nama : Ibu Putri

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 29

Jabatan : KAUUR Keuangan Desa

Pendidikan Terakhir: D3

A. Bagaimana tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang aplikasi website Indeks Desa Membangun?

Jawab “ bagus, IDM itu data desa yang di masukan kaya setiap tahunnya di update jadi berkembangnya itu ketahuan artinya kalau dalam tingkat kapasitas pengetahuan tentang penguasaan teknologi yang berbasis pemerintahan sudah cukup bagus di desa tapos I karena setiap tahunnya data-datanya ter update”

B. Upaya apa yang sementara di lakukan desa tapos I agar desa ini bisa menuju ke status desa mandiri?

Jawab “ sebenarnya untuk pemerintahan yang sekarang baru berjalan selama tiga tahun jadi, kita masih mengikuti arus saja, akan tetapi sekarang dari desa berkembang sekarang kita sudah menjadi desa maju, jadi kita semaksimal mungkin mengikuti peraturan dari pemerintah pusat dan daerah, dan update pembaharuan-pembaharuan dari desa yang lain mungkin bisa berkoordinasi misalnya dari desa yang sudah maju itu”

C. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan potensi desa agar bisa menjadi desa mandiri?

Jawab “ Pendukungnya banyak jaman sekarang kan sudah jamannya teknologi banyak masukan dari orang-orang yang di kota ke desa, kita juga banyak *sharing* (berbagi informasi) jadi tidak perlu studi banding jauh-jauh karena sekarang informasinya sudah bisa didapat tanpa batas. Kalau penghambatnya mungkin kualitas manusianya karena pendidikannya masih rendah jadi belum maksimal”

D. Apa saja usaha yang dilakukn desa dengan menggunakan APBDes?

Jawab “ kalo skarang usaha yang menghasilkan di desa itu belum ada dari 2020 pas corona jadi semua anggaran itu digunakan untuk penanganan covid dan BLT jadi untuk pemberdayaan BUMDes belum terlaksana tapi tahun ini desa harus dapat BUMDes dan desa harus punya usaha, Kalau rata-rata tingkat ekonomi masyarakat itu berasal dari ketahanan pangan dan perikanan kalo di desa tapos I”

6. Informan VI adalah Pendamping Lokal Desa Kecamatan Tenjolaya

Pada hari Senin, 20 februari 2023 pukul 14:34 WIB bertempat di kantor desa tapos I

Nama : Bapak Mad Soleh

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 47

Jabatan : PLD Kecamatan Tenjolaya

Pendidikan Terakhir: S1

A. Bagaimana tingkat kematangan SPBE pada desa-desa khususnya pada Desa Tapos I?

Jawab : “ kalau menurut saya implementasi di bidang elektronik terutama ada desa digital khususnya di wilayah kabupaten bogor desa di dorong untuk bagaimana desa itu berbasis elektronik, jadi nanti kedepannya masih di dalam proses ada aplikasi yang mendukung administrasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan administrasi yang adsa di desa”

B. Upaya apa yang sedang dilakukan pemerintah desa agar desa bisa meningkat ke status desa mandiri dnegan aplikasi IDM?

Jawab : “ yang pertama peningkatan kapasitas perangkat desa dan lembaga-lembaga desa kemudian realisasi dana desa yang khususnya untuk pemanfaatan yang lebih banyak kepada sektor lingkungan,pendidikan, kesehatan dan infrastruktur karena kalau 4 itu sudah bagus maka status desa akan naik secara otomatis.

C. Apa kesulitan yang dialami dalam penginputan data melalui aplikasi website IDM?

Jawab : “kesulitannya karena sinyal karena ada signal yang kurang kuat, karena ini online sistemnya jadi tidak offline melalui website kementerian desa jadi kesulitannya seperti itu”.

D. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Indeks Desa Membangun?

Jawab : “ jadi pemutakhiran data IDM itu setiap tahun untuk mengukur status desa dari yang sangat tertinggal,berkembang,maju,sampai mandiri nanti semua data di input dan pada akhirnya nanti ditentukan statusnya melalui berita acara, jadi ada tiga komponen yaitu Indeks Ketahanan Sosial,Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan”

7. Informan VII adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa

Tapos Pada hari Senin, 13 february 2023 pukul 10.03 WIB bertempat di kantor desa tapos I

Nama : Sandi Mulyana

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 24

Jabatan : KAUR TU dan UMUM

Pendidikan Terakhir: SMK

A. Apakah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat membantu tata usaha dalam urusan pelaporan?

Jawab : “Kalau menurut saya cukup membantu dari sektor pelaporan yang dulunya kita pelaporanya masih manual sekarang sudah dipermudah dengan sistem pemerintah yang berbasis elektronik”

B. Apa yang perlu di kembangkan agar desa bisa ditingkatkan menjadi desa mandiri?

Jawab : “untuk pengembagn yang sedang diupayakan desa kita mungkin sumberdaya manusianya yang sedang diupayakan karena dilihat dari segi sumberdaya manusianya belum memenuhi maka dari itu untuk meningkatkan level desa harus ada komunikasi dengan desa-desa lain yang sudah lebih maju atau mandiri biar lebih saling membagi pengetahuan atau *sharing*”.

C. Apakah dalam aplikasi Indeks Desa Mandiri sendiri pernah mengalami kendala?

Jawab : “ kalau kendalanya paling sering eror karena di dalam aplikasi IDM sendiri bukan hanya satu desa saja yang menggunakan aplikasi itu tapi banyak desa yang menggunakan aplikasi ini.”

8. Informan VIII adalah Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Tapos I

Pada hari Jumat, 17 februari 2023 pukul 13:16 WIB

Nama : Andri
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 38 Tahun
Jabatan : KASI KESRA

Pendidikan Terakhir: SMEA

A. Apakah masyarakat juga termasuk pengguna aplikasi IDM?

Jawab : “di era sekarang masyarakat memang dituntut dalam iptek bukan hanya secara manual saja tapi secara teknologi juga memang itu salah satu penunjang apalagi menjadi kebutuhan sebenarnya, dan terus terang untuk di desa tapos sendiri untuk aplikasi siskeudes atau aplikasi pernikahan itu sudah berbasis online semua dan untuk aplikasi Indeks Desa membangun sendiri sebetulnya yang pengguna itu kita perangkat desa akan tetapi di bantu oleh masyarakat dalam pengembangan potensi yang ada di desa”

B. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala Unsur Kesejahteraan Rakyat dengan melihat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sumberdaya dengan aplikasi?

Jawab : “ sekarang masyarakat rata-rata sudah memiliki hp android dan itu banyak aplikasi yang memang dari pemerintah juga diberikan, kalau saya sebagai perangkat desa setiap ada informasi yang terkait dengan kemasyarakatan misal ada aplikasi SIMKAMENAD itu kan bisa di *download* di hp masing-masing, pembayaran pajak SIMBARA baik itu kendaraan motor dan mobil itu juga masyarakat bisa mengakses. Jadi intinya kami dari pemerintah desa ketika ada aplikasi yang memang bisa diakses oleh masyarakat itu suka di berikan informasi oleh pemerintah desa”

C. Bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia?

Jawab : “Rata-rata kalau dilihat dari usia karena ini saya juga tidak bisa memungkiri karena kalau anak usia muda yang menggunakan aplikasi itu lebih cepat (daya tangkap) dibandingkan usia-usia yang belum terlalu bisa menguasai aplikasi tersebut. jadi semakin kemari kemajuan iptek itu memang sangat vital sekali ketika kita di dalam suatu instansi tidak ada yang mampu menguasai media digitalisasi ini. Jadi rata-rata untuk SDM sendiri kita dari usia 40 atau 30 tahun kebawah orang masih bisa menggunakan aplikasi dan yang untuk umur ke atas itu mungkin hanya bisa menerima informasi lewat *whatsapp* dll”

9. Informan IX adalah Pak RW 06 Desa Tapos Pada hari Rabu, 15 february 2023 pukul 14:36 WIB bertempat di rumah Bapak M Anggara

Nama : M Anggara

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 37 Tahun

Jabatan : KETUA RW 06

Pendidikan Terakhir: S1

A. Bagaimana pandangan bapak selaku rw 06 di desa tapos I terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik?

Jawab : “jadi untuk bahasa elektronik masyarakat kami masih kurang memahami tapi kalau untuk anak tamatan SMP SMA itu sudah bisa dan hanya orang-orang tertentu saja”.

B. Apa saja penghambat dalam pelaporan IDM?

Jawab : “kalo kita paling kekurangannya hanya di sumberdaya manusianya karena itu tadi bahasa elektroniknya masih belum memahami”

10. Informan X adalah Masyarakat Desa Tapos Pada hari Selasa, 14 februari 2023 pukul 13:53 WIB bertempat di rumah Ibu Wati

Nama : Ibu Wati

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 60 Tahun

Pendidikan Terakhir: SD

A. apakah ada partisipasi dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pengembangan pengembangan potensi di desa?

Jawab : “partisipasi masyarakat bagus di desa sini meskipun desa kita Cuma begini tetapi masyarakat juga berpartisipasi”

11. Informan XI adalah Masyarakat Desa Tapos Pada hari Selasa, 14 februari 2023 pukul 14:18 WIB bertempat di rumah Bapak Gusnadi

Nama : Gusnadi

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 67 Tahun

Jabatan : Kepala Sekplah

Pendidikan Terakhir: S1

A. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di desa tapos I ?

Jawab : “saya merasa selama ini untuk sumber dayanya kurang dilaksanakan kelihatannya karena faktor penghambatnya di sumber daya manusianya”.

B. Apakah ada upaya dari pemerintah desa kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi desa?

Jawab : “kalau untuk upaya mungkin sekarang pemerintah desa sedang berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya dengan di bangunya sekolah”.

12. Informan XII adalah Masyarakat Desa Tapos Pada hari Kamis, 16 februari 2023 pukul 15:40 WIB bertempat di persawahan

Nama : Ibu Jainap

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir: SD

A. Bagaimana pemerintah desa untuk meningkatkan potensi sumberdaya?

Jawab : “mungkin ada seperti bantuan, kadang kadang suka ada sih bantuan yang di kasi dari desa seperti beras”.

B. Apakah ada keluhan pelayanan dengan menggunakan teknologi digital ini?

Jawab : “tidak ada keluhan”

13. Informan XIII adalah Masyarakat Desa Tapos Pada hari Kamis, 16 februari 2023 pukul 15:59 WIB bertempat di persawahan

Nama : Ibu Lewi

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 49

Pendidikan Terakhir: SD

A. Bagaimana pandangan ibu tentang upaya pengembanagn potensi yang dilakukan oleh desa?

Jawab : “saya tidak tahu hanya kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga biasa juga ada yang nyuruh kula kuli jadi pendapatan saya cuman dari nanam padi sama bajak rumput buat memberi makan ternak punya orang kalau untuk potensi saya tidak tahu”.

B. Bagaimana pelayan di kantor desa dengan menggunakan teknologi?

Jawab : “ biasalah bagus cepat kalau mau urus ktp sudah bagus dan cepat, kerjanya juga cepat”.

C. Apakah partisipasi ibu sebagai masyarakat jika ada sosialisasi tentang pengembangan ekonomi desa dalam mengembangkan sumber potensi yang dibutuhkan dalam IDM ?

Jawab : “biasa saya juga ikut tapi biasa undangannya itu di bagi cuman separuh. saya tidak tahu indkes desa mambangun itu kalau soal yang begitu-begitu saya tidak tahu karena saya juga tidak memakai hp juga”

14. Informan XIV adalah Masyarakat Desa Tapos Pada hari Kamis, 16

februari 2023 pukul 16:07 WIB bertempat di persawahan

Nama : Bapak Handa

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 50

Pendidikan Terakhir: SD

A. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memperhatikan bapak selaku masyarakat untuk mengembangkan potensi di desa ini?

Jawab : “memang seharusnya diperhatikan dulunya kita di kasi traktor hanya sekarang belum dikasih lagi”.

B. Bagaimana menurut bapak pelayan dengan menggunakan aplikasi?

Jawab : “Desa Membantu dikasi surat pengantar ke kecamatan dan yang sudah dirasakan dengan menggunakan teknologi ini cepat”

15. Informan XV adalah Masyarakat Desa Tapos Pada hari Kamis, 16

februari 2023 pukul 16:07 WIB bertempat di rumah Ibu RT 02

Nama : Bapak Rudi

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 42

Pendidikan Terakhir: SD

A. Apakah Sistem pelayanan dengan Pemerintahan Berbasis

Elektronik Ini sudah di terima oleh masyarakat?

Jawab : “belum bisa kalo untuk misalkan bantuan yang di kasih oleh pemerintah jangan pake aplikasi kasihan banyak yang belum bisa jadi paling banyak anaknya yang bisa karena kita juga tidak bisa menggunakan aplikasi bantuan itu”

B. Apakah dari pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi

tentang pengembangan digitalisasi ke masyarakat?

Jawab : “tidak ada palingan kalau ada bantuan paling Rt yang memberi tahu karna untuk terima bantuan dengan aplikasi masih belum paham.

Lampiran 4**DOKUMEN PENDUKUNG (FOTO)**

Gambar 1 : Kantor Desa Tapos 1 Dan Perangkat Desa Tapos I



Gambar 2 : Camat Tenjolaya, Bapak Farid Ma`ruf



Gambar 3 : Kepala Desa Tapos I, Bapak Maman Nuriman



Gambar 4 : Sekretaris Desa, Bapak Ukar Sukardi



Gambar 5 : Kepala Seksi Pelayanan, Ibu Ika Kartika



**Gambar 6 : Wawancara Ibu Putri Selaku Kepala Urusan Keuangan
Desa Tapos I**



**Gambar 7 : Wawancara Bapak Mad Soleh Selaku Pendamping Lokal
Desa Kecamatan Tenjolaya**



Gambar 8 : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Mas Eko Agustin



Gambar 9 : Kepala Seksi Kesejahteraan, Bapak Andri



Gambar 10 : Ketua Rw 06, Bapak



Gambar 11 : Ibu Wati (Mayarakat)



Gambar 12 : Masyarakat, Bpk Gusnadi



Gambar 13 : Masyarakat (Buruh Tani), Ibu Jainap



Gambar 14 : Masyarakat (Buruh Tani), Ibu Lewi



Gambar 15 : Masyarakat (Buruh Tani), Bapak Handa



Gambar 16 : Masyarakat, Mang Rudi



Gamar 17 : Kegiatan Pembudidayaan Ulat Hongkong



Gambar 18 : Kegiatan Posyandu Desa Tapos I



INDEKS DESA MEMBANGUN

Username

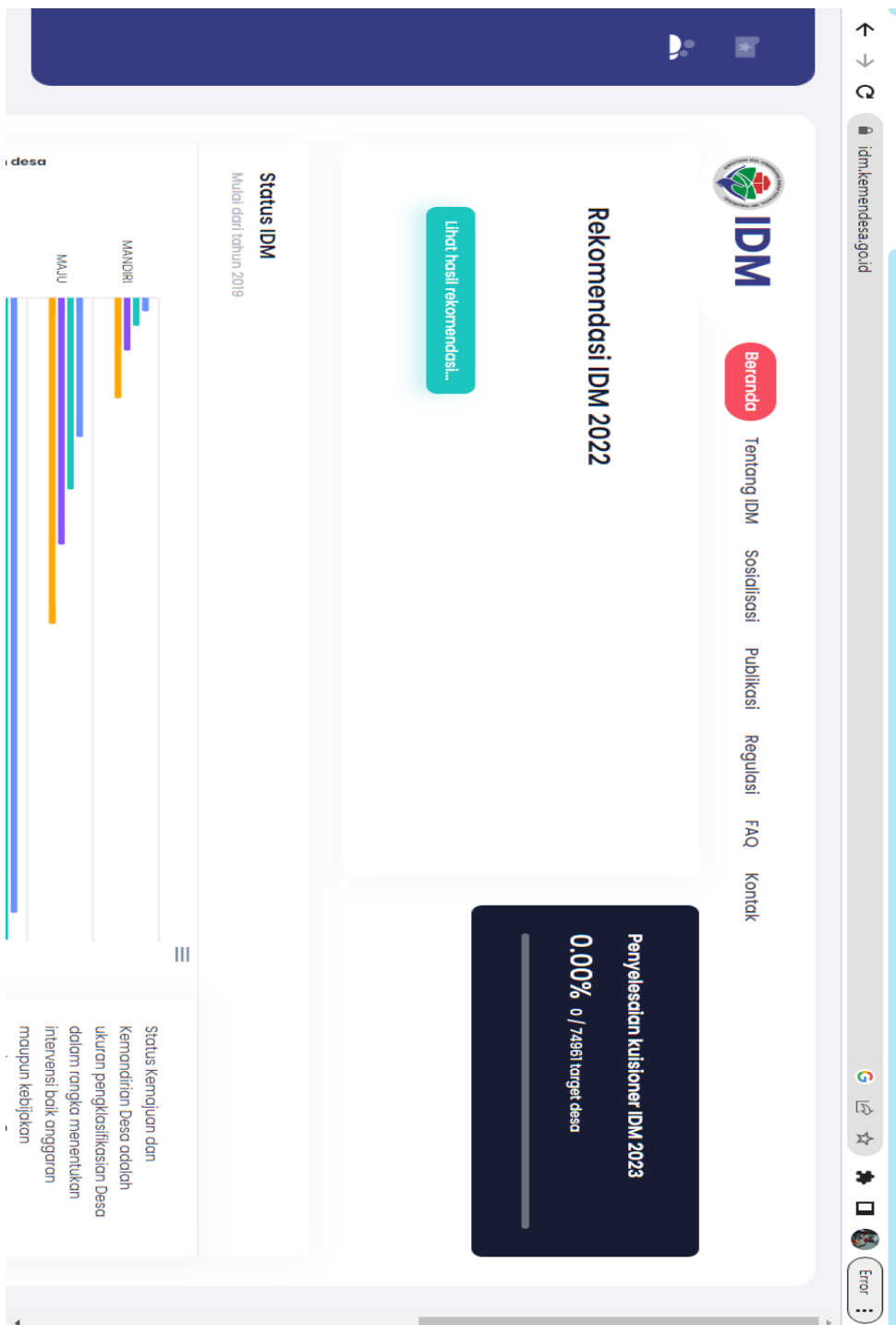
Password [Lupa password ?](#)

LOGIN

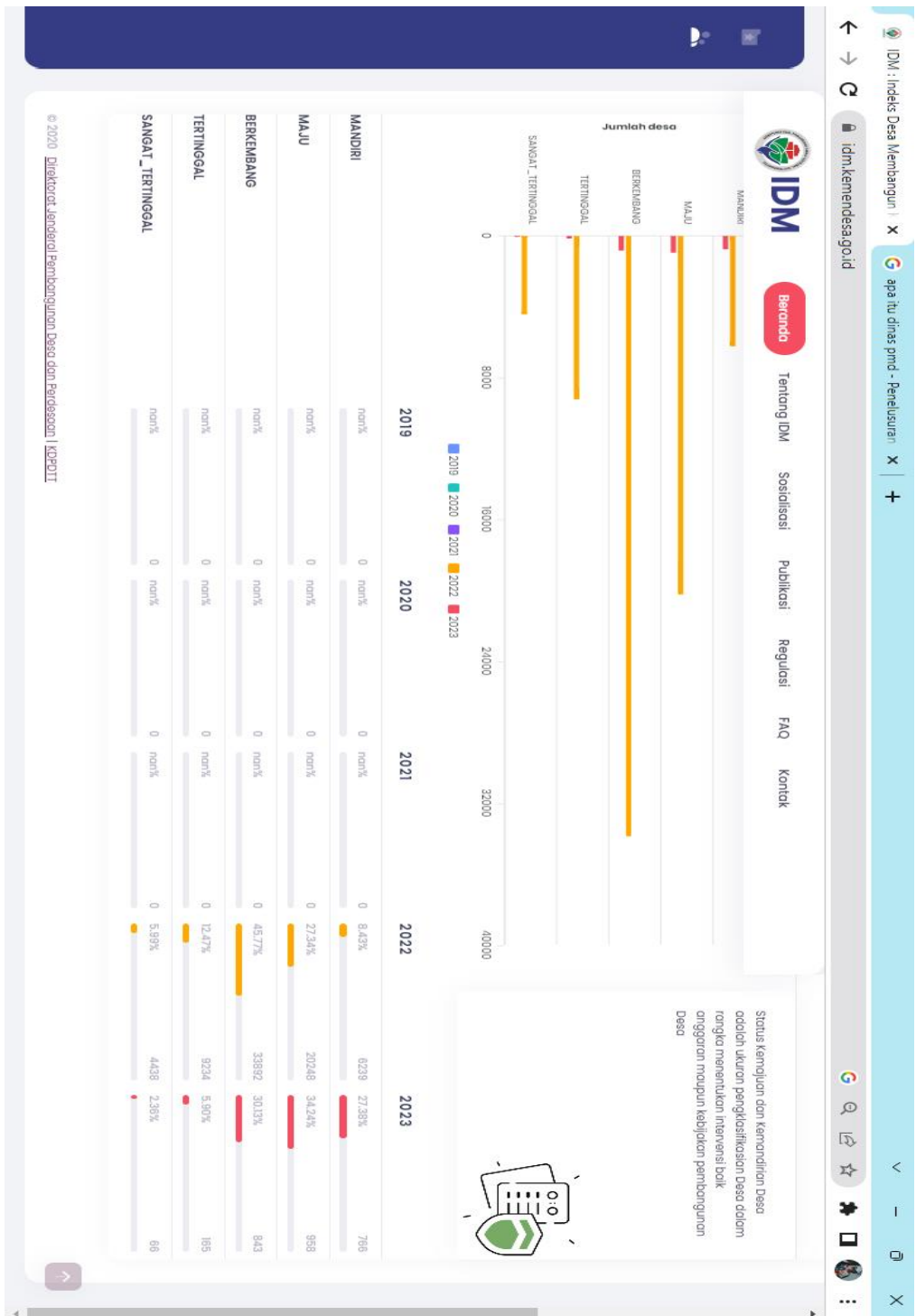


© 2020 [Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan | KEMENDesa](#)

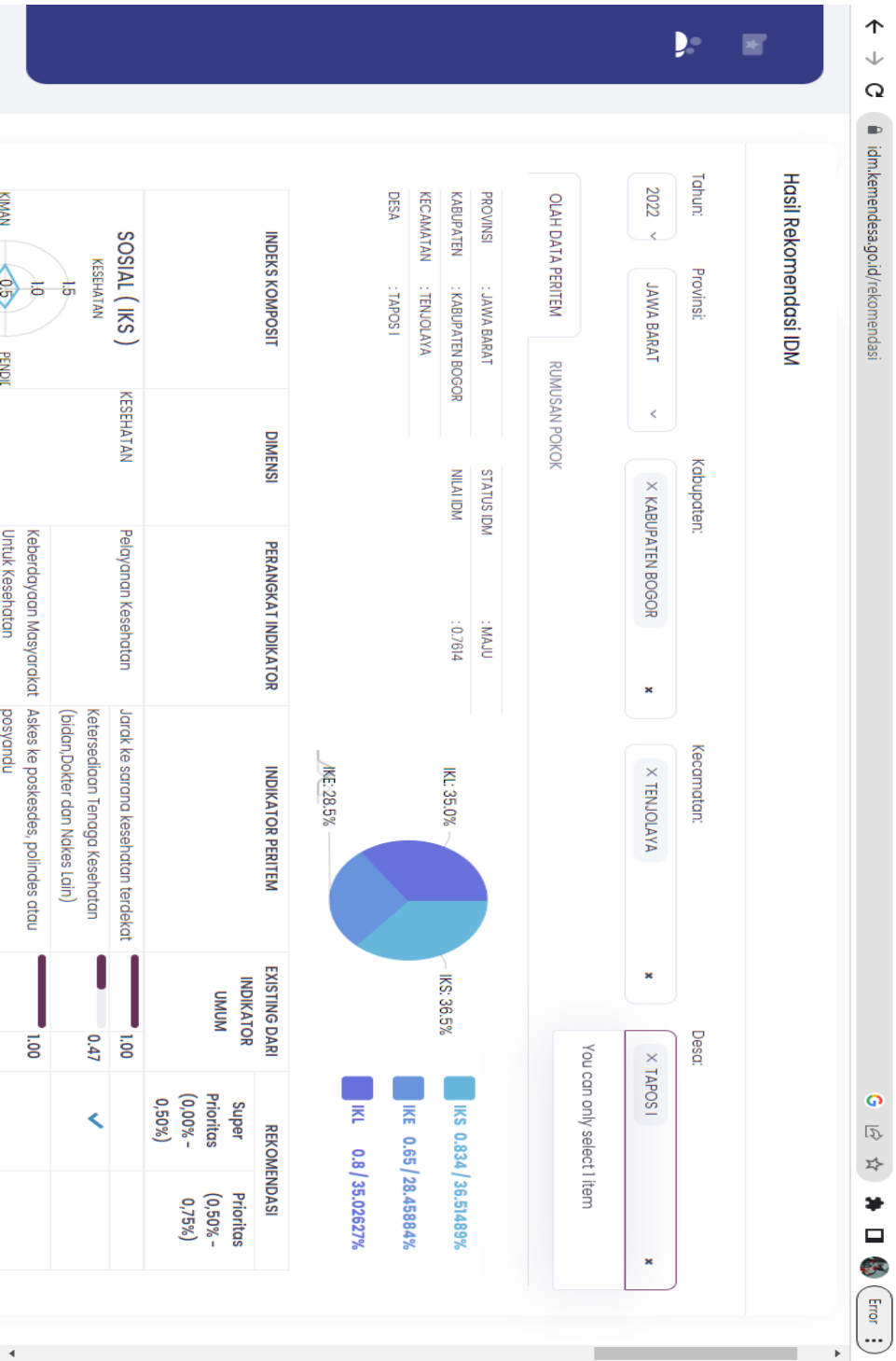
**Gambar tampilan utama sistus web idm.kemendes.go.id
Sumber : idm.kemendes.go.id**



Gambar Tampilan Awal pencarian hasil data rekomendasi IDM



Gambar Tampilan Awal Rekomendasi Data IDM



Gambar Rekomendasi Data IDM Desa Tapos I

idm.kemendesdesa.go.id/rekomendasi

Hasil Rekomendasi IDM

Tohuti: 2022

Provinsi: JAWA BARAT

Kabupaten: KABUPATEN BOGOR

Kecamatan: X TENJOLAYA

Desa: X TAPOS I

OLAH DATA PERITEM

RUMUSAN POKOK

PROVINSI : JAWA BARAT

KABUPATEN : KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN : TENJOLAYA

DESA : TAPOS I

SKOR IDM SAMA INI : 0.7614

STATUS IDM : MAJU

TARGET STATUS : MANDIRI

SKOR IDM MINIMAL : 0.8156

PENAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN : 0.0542

NO	INDIKATOR IDM	SKOR	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DI LAKUKAN	NILAI	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	CSR	LAINNYA
1	Skor Akses Sotres	5	Waktu tempuh dari s 30 Menit	-	0.0000			Dinkes, PU			
2	Skor Dokter	0	Jumlah dokter Tidak ada	Pengadaan Min 1 org Dokter	0.0095			DINKES			
3	Skor Bidan	5	Jumlah bidan ≥ 1 orang	-	0.0000			DINKES			
4	Skor Nakes lain	2	Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang	Penambahan Nakes Min 4 Org	0.0057			DINKES			
5	Skor Tingkat Kepesertaan BPJS	3	Jumlah peserta BPJS/Jumlah penduduk	Fasilitas kepesertaan BPJS warga Desa	0.0038			DINKES			BPJS

Gambar Rekomendasi Data IDM Desa Tapos I

Lampiran 5

DOKUMEN IZIN PENELITIAN



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Prodi Ilmu Pemerintahan : SK BAN-PT No. 2537/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Terakreditasi Peringkat "B"
Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2534/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/IV/2022, Terakreditasi Peringkat "B"

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax. : (021) 786 7696, 788 906 72, 788 906 73
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id



Jakarta, 17 Januari 2023

No : 041 /STIPAN-A1/I/2023

Lamp : -

Perihal : Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor

Sehubungan dengan adanya penulisan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, bersama ini kami mohon agar mahasiswa tersebut di bawah ini, diberikan ijin untuk mengadakan penelitian.

Nama : Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek
NPM : 192041939
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Pelayanan Desa melalui Pengembangan Aplikasi IDM Di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Pembimbing : Otti Ilham Khair, ST,S.Sos,M.Si, MH

Kami mohon sudilah kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut berupa penjelasan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Skripsi dimaksud.

Bahan-bahan ini hanya akan diolah dalam batas keperluan intern Kampus.

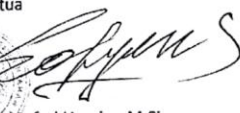
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan

Abdi Negara

A/n Ketua

Wakil Ketua


Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si

Tembusan :

1. Camat Tenjolaya Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836
Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Tlp/Fax. (021) 8758836

Nomor : 000.9.2/ 61 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Cibinong, 30 Januari 2023
Kepada
Yth. Camat Tenjolaya
Kabupaten Bogor
di
Tenjolaya

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Memperhatikan :

Surat Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Nomor : 041/STIPAN-A1/1/2023, Tanggal 17 Januari 2023. Perihal Surat Ijin Penelitian.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **SFASE JUSDE JUAN CHRISTIAN RUMSOWEK**
Alamat : Saonek Rt. 003 Rw. 002 Desa Saonek Kecamatan Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat
Judul Penelitian : Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pelayanan Desa melalui Pengembangan Aplikasi IDM di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab : **Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si**
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Waktu : 3 Februari 2023 s.d 17 Maret 2023
Tempat : Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari tempat lokasi penelitian setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Ptt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.



PEMERITAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJOLAYA
KANTOR KEPALA DESA TAPOS I

Alamat : Jalan Raya Tenjolaya No 02 Desa Tapos I Kec.Tenjolaya - Kab. Bogor (16371)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 100/2001/03/V/2023

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor menerangkan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan (STIPAN) Jakarta telah menyelesaikan kegiatan penelitiannya di desa kami dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	NPM	Mulai Penelitian	Selesai Penelitian	Keterangan
1	SPASE JUSDE JUAN CHRISTIAN RUMSOWEK	192041939	3 Februari 2023	17 Maret 2023	Baik
2	NIKSON DIYEIGOI	192041929	12 Januari 2023	30 Maret 2023	Baik
3	MARTEN L. MANDACAN	192041926	15 Maret 2023	14 April 2023	Baik
4	FERI YANTO MANSIM	192041919	15 Maret 2023	14 April 2023	Baik

Bahwa para mahasiswa tersebut selama kegiatan penelitian di desa kami dari segi Koordinasi, Etika, kerjasama dan interaksi dengan unsur pemerintahan dan masyarakat kami secara keseluruhan sangat baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tapos I, 22 Mei 2023
Kepala Desa Tapos I

(MAMAN NURIMAN)

Lampiran 6

DOKUMEN KEGIATAN PEMBIMBINGAN

IDENTITAS MAHASISWA BIMBINGAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Nama	: Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek	
Tempat /Tanggal Lahir	: Saonek 28 November 2001	
Alamat	: Jl. A Yani Lorong Ipa Rt 004/Rw 005 Waisai Kota	
	Kode Pos : 98471	
Telepon	: Rumah- Hp 0821 7220 8289	
Pekerjaan	: Pelajar Mahasiswa	
Alamat Kantor	: Jl. Agung Raya 1 No. 18B, Rt.4/Rw.3, Lenteng Agung (Alamat tempat tinggal)	
	Kode Pos : 12630	
Telepon	: Kantor -	Fax -
Pembimbing	: Otti Ilham Khair, S.T., S.Sos., M.Si., M.H.	
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM PELAYANAN DESA MELALUI PENGEMBANGAN APLIKASI IDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI DESA TAPOS 1 KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT	

**CATATAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN DAN
KONSULTASI**

Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
12 juli 2022	Mengajukan judul Skripsi kepada dosen pembimbing melalui via zoom	
18 juli 2022	Pengajuan judul skripsi secara tatap muka, membahas mengenai judul yang dipilih oleh mahasiswa dan di tetapkan dan di ACC oleh Dosen Pembimbing	
1 Agustus 2022	Bimbingan BAB I, Dosen Pembimbing memeriksa dan mengoreksi, serta memberikan saran untuk Latar Belakang pada BAB I	
30 Agustus 2022	Bimbingan BAB II, Dosen Pembimbing memeriksa dan mengoreksi, serta memberikan saran untuk menambahkan teori dan memberikan saran untuk bagian-bagian sub pada BAB II khususnya untuk kerangka pemikiran, dan hasil penelitian yang relevan	
14 September	Bimbingan BAB III, Dosen Pembimbing memeriksa bab III dan meberikan saran agar lebih memperhatikan daftar pustaka pada bab III	
3 Oktober 2022	Bimbingan BAB I,II,III Pemeriksaan dan memberi saran agar cara penulisan dan jarak di perhatikan lagi serta perhatikan posisi penulisan gambar,dan tabel.	
7 November 2022	Bimbingan BAB I sampai BAB III Dosen memriksa penulisan, typo	
9 November 2022	Bimbingan BAB I, BAB II dan BAB III pemeriksaan dan pendaftaran Sidang Usulan Penelitian	

22 Mei 2023	Bimbingan BAB IV dan BAB V Perhatikan dan perbaiki Daftar Pustaka lalu kemudin diACC	A
24-5-23	Siap disidangkan	A

RIWAT HIDUP



Sfase Jusde Juan Christian Rumsowek Lahir Di Saonek Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 28 November 2001 Tumbuh dan Dibesarkan Dari Keluarga Sederhana Anak dari Bapak Markus Rumsowek dan Ibu Ferderika Ogaje merupakan anak pertama dari dua bersaudara, sejak 17 tahun penulis tinggal bersama keluarga dan menyelesaikan studi di kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.

Sejak kecil umur 4-5 tahun penulis memiliki hobi mendengarkan musik dan gemar bermain sepak bola hingga penulis beranjak ke masa kanak-kanak dan mulai menempu pendidikan TK pada umur 4 tahun kemudian masuk menepuh pendidikan Sekolah Dasar pada umur yang 6 tahun dan menyelesaikan

pendidikan Sekolah Dasar 2013, penulis pernah mengikuti lomba cerita rakyat di tingkat kabupaten mewakili SD N 1 Saonek semasa penulis kelas 6 SD tanggal 3 april 2013 juga pernah mengikuti lomba solo tingkat sekolah minggu dan mendapatkan juara 1 tahun 2012.

Beranjak ke masa pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah di SMP N 1 Raja Ampat Pertama pada umur yang ke 12 tahun di masa bangku SMP kelas 2 penulis pernah mengikuti olimpiade fisika tingkat SMP yang di selenggarakan di dinas pendidikan kabupaten raja ampas. Penulis akhirnya lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016

Tahun 2016 penulis masuk pada pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Raja Ampat selama di masa SMA penulis mengembangkan bakat di bidang olahraga futsal dan belajar bermain music gitar selai itu juga penulis pernah mengikuti tarian lokal Papua dalam rangka Injil Masuk Tanah Papua. Di bangku SMA penulis pernah belajar menjadi pemimpin dengan jabatan sebagai ketua kelas pada kelas 3 SMA dan pada akhirnya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta lulus dari SMA pada tahun 2019.

Di tahun 2019 tpennulis mulai melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada perguruan tinggi S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara penulis juga aktif di bidang ekstra kulikuler Korsik, dan di tahun 2022 penulis memegang jabatan sebagai wakil bupati wahana bina praja periode 2022/2023dan turut aktif dalam kegiatan WBP dan penulis dapat menyelesaikan kuliah di tahun 2023 dengan pegangan kutipan ayat Alkitab yang terdapat dalam Filipi 4:13 yang berkata “Segala perkara dapat ku tangguang di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”.